

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)
KABUPATEN TANAH LAUT**



**LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) disusun untuk memenuhi ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan serta Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Beberapa Kendala, serta hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun berikutnya.

Disadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukkan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan agar LAKIP/LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dapat disusun dengan lebih baik.

Mudah-mudahan LAKIP/LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut ini dapat bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan LAKIP/LKj ini di ucapkan Terima Kasih.

Pejabat, 20 Januari 2023

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut



H. BAMBANG KUSUDARISMAN, S.P., M.Si
NIP. 19680816 199010 1 003

A. Maksud dan Tujuan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras. Petunjuk Teknis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menjelaskan secara detail mengenai perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi Pemerintah.

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran kinerja, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan instansi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap berupa siklus akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Arti nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh pengguna anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis. Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk :

- Merencanakan kinerja dan target kinerja,
- Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan,
- Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, serta
- Telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

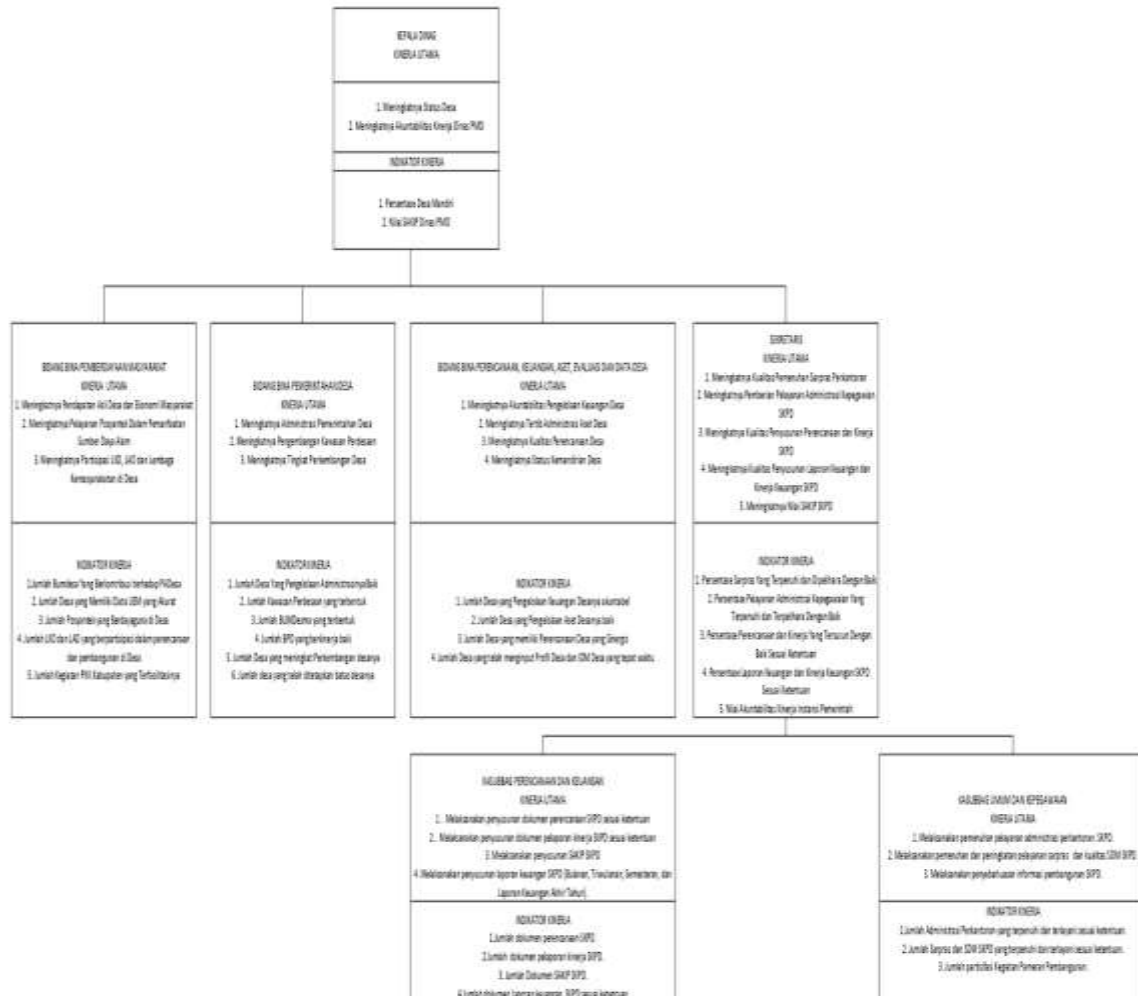
B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja SKPD sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang rencana induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
7. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor; PM.35/UM.001/MPEK/2012 Tentang Rencana Strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 Tanggal 31 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

D. Cascading Kinerja



Palang, 1 Januari 2024
 Kepala Desa Perbatasan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanah Laut

H. BAMBANG KUSUDHARWAN, S.P., M.S.
 NIP. 196002 29001 1 001

Ringkasan Eksekutif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan serta Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 Memiliki Visi yaitu : **“Terwujudnya Tanah Laut Yang BERINTERAKSI (BERkarya, INovasi, TErtata, Religius, AKtual dan SInergi)”** yang Mana Visi tersebut akan diwujudkan melalui misi yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Tahun 2023. Dalam proses dan upaya pencapaian visi dan misi tersebut diatas, pada saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Amanat Kinerja yang telah ditetapkan melalui Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta target yang terukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mana indikator Kinerja Utama tersebut merupakan alat Ukur Guna tercapainya sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 - 2023.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun selanjutnya diperlukan kesinambungan yang perlu terus dipelihara dan dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unit yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

Pelaihari, 20 Januari 2023

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut



H. RAMBANG KUSUDARISMAN, S.IP., M.SI
NIP. 19680816 198010 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan.....	6
C. Dasar Hukum.....	
D. Cascading Kinerja.....	
E. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	3
F. Isu Strategis	10
G. Dukungan Sumber Daya Manusia	12
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP sebelumnya.....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. Visi RPJMD	15
B. Misi RPJMD	16
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	18
D. Indikator Kinerja Utama	20
E. Perjanjian Kinerja	21
F. Program dan Kegiatan	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	29
1. Sasaran RPJMD	31
2. Eselon II Kepala Dinas	44
3. Eselon III Sekretaris	56
4. Eselon III Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat	61
5. Eselon III Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan	84
6. Eselon III Bidang Bina Pengembangan Kawasan perdesaan	94

7. Eselon IV Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	106
8. Eselon IV Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	111
B. Akuntabilitas Keuangan	115
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023	115
2. Anggaran dan realisasi Menurut Sasaran dan Program	116
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023	124
BAB IV PENUTUP	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Strategi Peningkatan Kinerja	126
LAMPIRAN	
1. IKU	
2. Pernyataan Hasil Review	
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
4. Pohon Kinerja	
5. Capaian Kinerja	
6. Monev Renstra	
7. Matrik Keselarasan	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan Kinerjanya sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampain LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut ini di maksudkan sebagai perwujudan untuk Pertanggung Jawaban keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut hal ini diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2018 – 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dan juga penetapan Kinerja Tahun 2023, disamping itu penyusunan LAKIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk perbaikan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dimasa yang akan datang.

Inti dari pertanggungjawaban kinerja adalah perbandingan antara target yang akan ditetapkan dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun anggaran, Hal ini menuntut adanya aktivitas pengelolaan data kinerja secara terus menerus selama periode kegiatan berlangsung. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten terhadap indicator yang telah disepakati dalam rencana kinerja.

Untuk menjamin dan mempertahankan obyektivitas hasil pengukuran kinerja tersebut, integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya yang lain mutlak diperlukan. Dalam jangka menengah keberhasilan strategi ini terlihat dari adanya peningkatan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan program, sedangkan dalam jangka pendek, strategi ini berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, Adapun dalam jangka panjang, strategi ini akan menempatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut tetap eksis di era otonomi daerah.

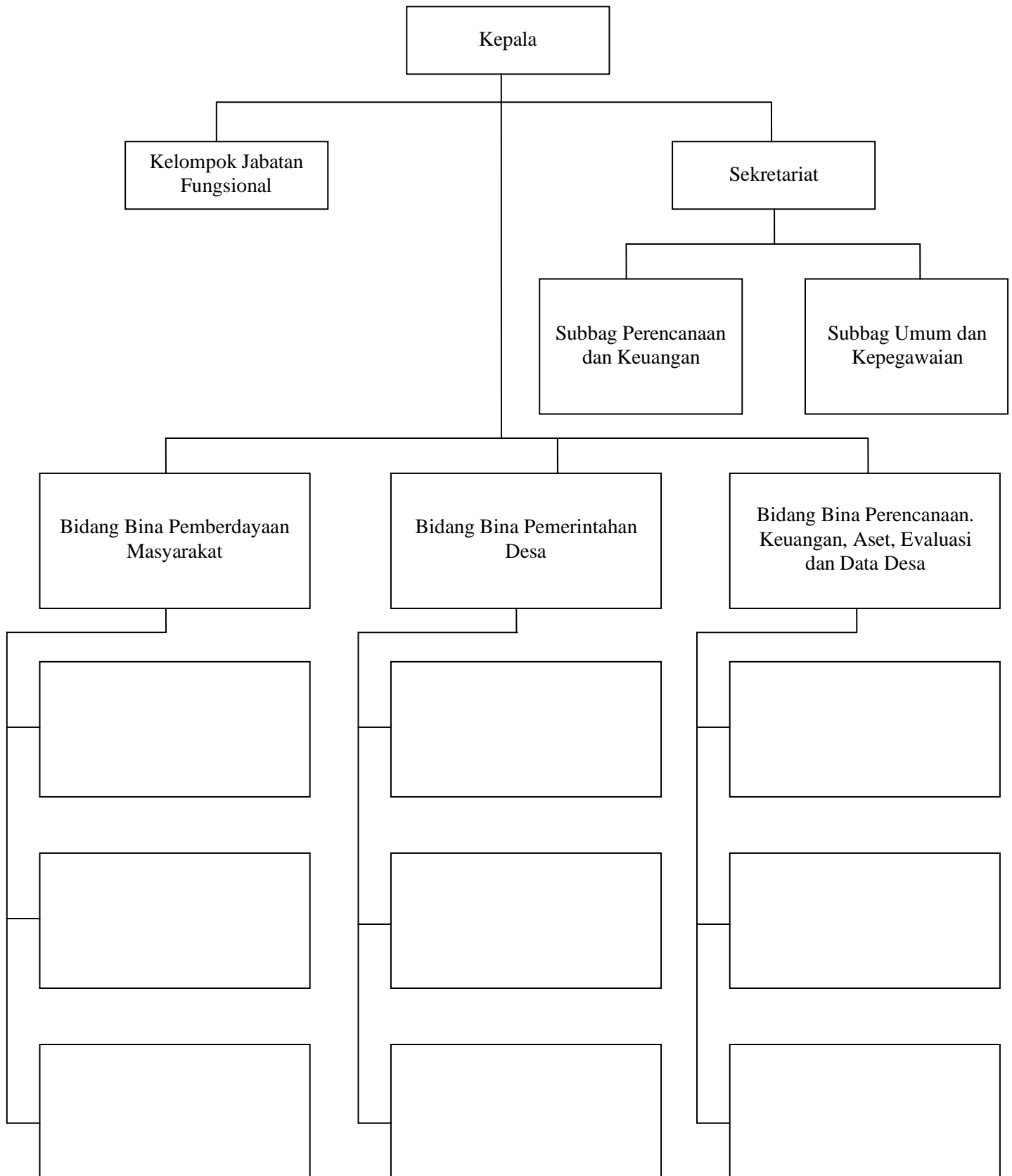
A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditunjukkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global dalam perspektif perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (good governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indicator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut juga merupakan amanat Perpres Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

1. STRUKTUR ORGANISASI DPMD KABUPATEN TANAH LAUT



1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut adalah unsur Pendukung Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dibidang Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut terdiri atas :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Pemerintahan Desa;
 - d. Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa
- a. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan dan Desa, Pengembangan Sosial Budaya dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengembangan Sosial Budaya dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;.
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 4. Pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 5. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal; dan
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Sekretariat
- Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua pihak baik pelayanan ke dalam maupun keluar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, penyusunan program dan

penyusunan pelaporan dinas serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain untuk kelancaran tugas sehari-hari;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang kelembagaan, perkembangan dan kerja sama desa, pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
3. Menyusun dan merencanakan program/kegiatan serta langkah-langkah pada sekretariat sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah-tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
5. Mengkoordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
6. Mengkoordinasikan semua tugas dengan masing-masing bidang;;
7. Menyelenggarakan urusan surat menyurat, perencanaan, keuangan dan kepegawaian, rumah tangga, keamanan, kebersihan, dan urusan lainnya yang belum diuraikan di bidang lain;
8. Mengkoordinasi penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan data laporan sekretariat dan bidang;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun secara lisan disertai dengan saran/pertimbangan untuk mendapatkan petunjuk serta arahan lebih lanjut;
10. Menyusun informasi urusan kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan dinas pada sekretariat sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
11. Mengelola barang/aset milik daerah/kekayaan negara;
12. Membagi tugas kepada sub bagian di bawahnya sesuai dengan uraian tugas dan fungsi;
13. Memberikan penilaian terhadap kinerja bawahan;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan uraian tugas dan fungsi.

Sekretaris membawahi :

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

➤ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan program/kegiatan, pengelolaan urusan keuangan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan mengkompilasi semua usulan dari bidang-bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran Dinas;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun, daftar isian pelaksanaan anggaran, kegiatan, dan revisi anggaran;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- g. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- h. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

- i. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- j. melaksanakan administrasi keuangan;
- k. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- l. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

➤ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol, kepustakaan dan dokumentasi.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;

- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian ;
 - h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - m.melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
 - p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- c. Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat
- Uraian tugas Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang bina pemberdayaan masyarakat ;
 - Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang bina pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku ;
 - Melaksanakan kebijakan di bidang Pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta pemberdayaan Partisipasi masyarakat ;
 - Memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang Pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta pemberdayaan Partisipasi masyarakat ;
 - Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina pemberdayaan masyarakat; dan
 - Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- d. Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa
- Uraian tugas Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa sebagai berikut :
- Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang bina pengembangan kawasan perdesaan;
 - Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria bidang bina pengembangan kawasan perdesaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - Melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
 - Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
 - Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Kawasan Perdesaan; dan
 - Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- e. Bidang Bina Pemerintahan Desa
- Uraian tugas Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai

berikut :

- Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
- Penyusunan program, pengkoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang bina pemerintahan desa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bina pemerintahan desa;
- Penyusunan program, pengkoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengendalian bina penataan dan administrasi pemerintahan desa;
- Penyusunan program, pengkoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengendalian bina peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- Penyusunan program, pengkoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina pemerintahan desa; dan
- Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Dinas, Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan Fungsi yang memerlukan keahlian tertentu secara professional sesuai dengan kebutuhan Organisasi.

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Tanah Laut pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023 yaitu ;

- Belum optimalnya pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

- Masih rendahnya Kualitas aparatur tingkat desa dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat
- Pendapatan desa masih rendah karena belum terbentuk serta belum dimanfaatkannya BUMDES sebagai sumber pendapatan desa
- Belum sepenuhnya penggunaan dana desa sebagai penggerak perekonomian desa
- Belum optimalnya penggunaan pemetaan potensi desa sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat desa masih berjalan ditempat
- Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha – usaha produktif masih rendah
- Sebagian besar desa di kabupaten Tanah Laut belum memiliki RPJM Desa dan RKP desa
- Kurang optimalnya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan kelompok masyarakat pembangunan desa
- Kurang optimalnya kegiatan pembinaan adat budaya desa
- Masih kurangnya pengetahuan aparat desa tentang pembangunan desa
- Alokasi dana desa sebagian besar diperuntukan untuk pembangunan fisik desa

Dalam kondisi kehidupan masyarakat pedesaan yang makin heterogen, sementara kemampuan pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan pedesaan makin terbatas, maka upaya percepatan pembangunan pedesaan memerlukan kebersamaan masyarakat sebagai penggerak utama. Pada situasi semacam ini, hanya melalui partisipasi aktif masyarakat desa memungkinkan dilakukan perubahan mendasar dalam gerak pembangunan desa.

Hal ini mengandung arti bahwa pengembangan pedesaan hanya memungkinkan dilakukan bila ada faktor pengikat yang menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat. Langkah utama yang perlu digali dan dikembangkan dalam upaya mengembangkan momentum baru pembangunan pedesaan adalah pengembangan sumber daya manusia pedesaan dan semua potensi desa yang dimiliki (local genius) secara terarah dalam berbagai jangka waktu untuk dilakukan pemberdayaan berkualitas.

Dengan adanya isu strategis Permasalahan pembangunan kabupaten Tanah Laut ini, masyarakat yang berdaya dan Pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi Penanggulangan kemiskinan yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selain solusi tersebut maka Dinas Pemberdayaan masyarakat melakukan pemetaan permasalahan yang mendasari permasalahan pembangunan Kabupaten Tanah laut yang menjadi urusan kewenangan Dinas Pemberdayaan masyarakat.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMD sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, DPMD Kabupaten Tanah Laut memiliki sumber daya aparatur sampai pada keadaan Bulan Desember 2023 berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang pegawai dengan rincian :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SMP	-	Perempuan	1
2	SMA	Laki-Laki	Perempuan	5
3	D3	Laki-Laki	Perempuan	6
4	D4	-	-	-
5	S1	Laki-Laki	Perempuan	14
6	S2	Laki-Laki	-	4
Jumlah				30 Orang

b. Berdasarkan Golongan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan IV	Laki-Laki		6
2	Golongan III	Laki-Laki	Perempuan	13
3	Golongan II	Laki-Laki	Perempuan	11
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah				30 Orang

E. PRODUK DAN LAYANAN

Untuk lebih mengefektifkan Kegiatan Perencanaan Pembangunan daerah maka berdasarkan Kepres Nomor 27 Tahun 1980 dibentuklah organisasi Dinas PMD selanjutnya dijabarkan dalam Kepmendagri Nomor 185 Tahun 1980

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PMD .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Organisasi perangkat Daerah, yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya Bumdes dan terdatanya jumlah pelaku usaha ekonomi masyarakat.
2. Melakukan pembinaan Posyantek, Posyantek yang aktif dalam pemanfaatan TTG dan Inovasi TTG yang dilombakan.
3. Melaksanakan kegiatan Manunggal Tuntung Pandang se Kabupaten Tanah Laut, Rakor, Lomba, dan Pembinaan yang dilaksanakan oleh PKK dan Pembinaan P3MD.
4. Mengidentifikasi dan inventarisasi Lembaga Adat.
5. Melaksanakan sosialisasi Lembaga Adat Desa di 11 Kecamatan.
6. Membentuk Lembaga Adat Desa.
7. Melakukan pembinaan terhadap BKAD
8. Melaksanakan Bimtek Profil Desa.
9. Melaksanakan Bimtek/Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Melakukan Bimtek Penataan Administrasi Desa.
11. Melaksanakan Bimtek Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
12. Melaksanakan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa.
13. Melaksanakan pembentukan Desa Berciri Khas

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

- **Ringkasan Eksekutif**, Ringkasan garis besar ruang lingkup muatan lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- **Bab I Pendahuluan**, terdiri dari latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- **Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, terdiri dari VISI, MISI, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) 2023, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, terkait dengan Akuntabilitas kinerja organisasi maupun Akuntabilitas Keuangan.
- **BAB IV Penutup**, dalam Bab ini memuat ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan strategi peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- **Lampiran Lampiran**
 - IKU
 - Pernyataan Perjanjian Kinerja
 - Cascading/Pohon Kinerja
 - Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
 - Monev Renstra
 - Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI

“Terwujudnya Tanah Laut Yang BERINTERAKSI (BERkarya, INovasi, TErtata, Religius, AKtual dan SINergi)”

Penjelasan Visi:

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi diatas merupakan singkatan dari frasa : “Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

a. Berkarya

Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023 para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut , secara bersama-sama , berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

b. Inovasi

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi ini berupa terobosan jenis pelayanan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung . selain itu, inovasi ditingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraanya.

c. Tertata

Aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan diperangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan berkesinambungan.

d. Religius

Peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di setiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

e. Aktual

Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

f. Sinergi

Sinergi dimaksud untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidag harus dihapus dan digantikan dengan integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah “DESA DI BINA, KOTA DITATA”. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah “KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS BERKUALITAS, DAN IKHLAS”.

B. MISI

1. Berkarya Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, Sosial dan budaya
2. Menciptakan Inovasi di segala Sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan Industri Kreatif.
3. Membangun Tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas religius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat
5. Membangun Sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut memiliki peran dalam pencapaian terhadap :

- 1. Misi ke- 2 (dua), yakni** : Menciptakan Inovasi di segala Sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan Industri Kreatif.
 - Tujuan ke 2.2 : Peningkatan Inovasi di Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif.
 - Sasaran ke 2.2.1 : Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam Perekonomian.

- 2. Misi ke- 3 (tiga), yakni** : Membangun Tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).
 - Tujuan ke 3.1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi.

 - Sasaran ke 3.1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Pelayanan Publik.
 - Indikator Sasaran : Persentase Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan yang Tertib.

 - Sasaran ke 3.1.2 : Meningkatnya Transparansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- 3. Misi ke- 5 (lima), yakni** : Membangun Sinergitas yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
 - Tujuan ke 5.1 : Peningkatan Kinerja Pembangunan yang Berkualitas Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

(PembangunanInklusif).

- Sasaran ke 5.1.2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.
- Indikator Sasaran : Cakupan Pembinaan Kelompok PKK.

- Tujuan ke 5.5 : Peningkatan Upaya Membangun Desa, Menata Kota.
- Sasaran ke 5.5.1 : Meningkatnya Desa Membangun.
- Indikator Sasaran : Persentase Klasifikasi Status Desa

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun,Tujuan di ditetapkan dengan mengacu kepada Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tujuan dan Indikator tujuan yang ingin dicapai dalam bidang Pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yakni :

1. Menciptakan Inovasi di segala Sendi Kehidupan Masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif (**Misi 2**)

Indikator Tujuan :

- a. Terbentuk dan berkembangnya teknologi tepat guna di masyarakat, dengan terbentuknya Pos Pelayanan Tekonogi Tepat Guna (Posyantek TTG) didesa akan menumbuhkan rasa inovatif dalam menciptakan sebuah alat yang dapat dikembangkan oleh masyarakat yang nantinya akan menumbuhkan perekonomian didesa dan alat tersebut mempunyai mamfaat bagi orang banyak yang nantinya akan bernilai ekonomis.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik yangBerkualitas Berbasis Teknologi Informasi (**Misi 3**)
3. Peningkatan Kinerja Pembangunan yang Berkualitas Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya(Pembangunan Inklusif). (**Misi 5**)

Indikator Tujuan :

- a. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui tumbuh dan berkembangnya industri kerajinan rumah tangga dalam pemberdayaan PKK, melalui kegiatan pelatihan (pembuatan sasirangan, pembuatan kerajinan tangan, dll) maupun bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten serta pembinaan dan lomba- lomba

yang dilaksanakan dikecamatan maupun desa-desa sehingga masyarakat desa akan menjadi mandiri dalam membuat sebuah usaha maupun menciptakan terampilan lainnya dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga.

4. Peningkatan Upaya Membangun Desa Menata Kota (**Misi 5**)

Indikator Tujuan :

a. Indeks Desa Membangun (Persentase meningkatnya status desa).

5. Terwujudnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

b. Nilai RB dan Nilai SAKIP

SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh Instansi Pemerintah dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan, adapun sasaran bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

“ Indeks Desa Membangun (Persentase meningkatnya status desa) “

Indikator sasaran : Persentase Klasifikasi Status Desa

“ Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Indikator Sasaran : Nilai RB dan Nilai SAKIP

Selanjutnya akan diuraikan mengenai tujuan dan sasaran strategis beserta indicator kinerjanya sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Upaya Membangun Desa, Menata Kota	Indeks Desa Membangun (Persentase meningkatnya status desa)	Persentase Klasifikasi Status Desa	20%	20%	20%	20%	20%

2	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB dan	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)
3	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	75 (BB)

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sasaran target indikator kinerja utama adalah sasaran yang terkait dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kinerja secara
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif, serta tingkat capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH LAUT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Indeks Desa Membangun (Persentase meningkatnya status desa)	Persentase Klasifikasi Status Desa	Sasaran pada indikator ini dimaksudkan untuk meningkatkan status desa. Formula dalam perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah Desa yang naik Statusnya / Jumlah Desa x 100%	DPMD Kabupaten Tanah Laut	DPMD Kabupaten Tanah Laut

**Target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Tanah Laut 2019 – 2023 dapat dilihat pada
tabel berikut :**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target Kinerja Sasaran				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Peningkatan upaya membangun desa, menata kota	Persentase Klasifikasi Status Desa	Indeks Desa Membangun (Persentase meningkatnya status desa)	Persentase Klasifikasi Status Desa	0%	20%	20%	20%	20%	20%

E. PERJANJIAN KINERJA 2023

Sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, maka setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun “Penetapan Kinerja” berdasarkan alokasi anggaran yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas,transparansi dan kinerja aparatur
2. Komitmen antara dua pihak penerima dengan pemberi amanah
3. Penilaian keberhasilan / kegagalan suatu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
4. Tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
5. Dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Tabel I**Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Penanggung Jawab
1	Indeks Desa Membangun (Persentase meningkatnya status desa)	Persentase Klasifikasi Status Desa	20%	Kepala Dinas
2	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	Persentase sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dengan baik	100%	Sekretaris
3	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dan terpelihara dengan baik	100%	Sekretaris
4	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	Sekretaris
5	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan & kinerja keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	Sekretaris
6	Meningkatnya kualitas perencanaan , keuangan , pelaporan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	75 (BB)	Sekretaris

7	Meningkatnya ekonomi desa	Persentase usaha ekonomi(BUMDesa) yang terbentuk dan aktif dan Persentase pemetaan dan pendataan usaha ekonomi di desa	100%	Kabid Bina Pemberdayaan Masyarakat
8	Meningkatnya pelayanan posyanteK dalam pemanfaatan sumber daya alam	Persentase posyanteK yang terbentuk dan aktif	100%	Kabid Bina Pemberdayaan Masyarakat
9	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Persentase terselenggaranya kegiatan partisipasi masyarakat	100%	Kabid Bina Pemberdayaan Masyarakat
10	Meningkatnya administrasi desa	Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik	100%	Kabid Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa
11	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase pengembangan kawasan perdesaan	40%	Kabid Bina Pemerintahan Desa
12	Meningkatnya Kualitas Data Desa	Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa	40%	Kabid Bina Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Data Desa
13	Meningkatnya Kemampuan Pengurus Lembaga Adat Desa	Persentase lembaga Adat desa yang dibina	40%	Kabid Bina Pemberdayaan Masyarakat
14	Cakupan Kinerja Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Persentase desa yang di evaluasi tingkat perkembangannya	100 %	Kabid Bina Pemerintahan Desa
15	Melaksanakan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD	Jumlah administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 dokumen	Kasubag Umum dan Kepegawaian

16	Melaksanakan pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasaranaan kualitas SDM SKPD	Jumlah sarana prasarana dan SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	14 unit	Kasubag Umum dan Kepegawaian
17	Melaksanakan penyebarluasan informasi pembangunan SKPD	Jumlah partisipasi kegiatan pameran pembangunan	2 kali	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renja,Renja perubahan dan Renstra)	3 dokumen	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
19	Melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD (LAKIP,LPPD/LKPJ)	2 dokumen	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
20	Pelsaksanaan penyusunan SAKIP SKPD	Jumlah dokumen SAKIP SKPD (Pohon Kinerja,IKU dan PK)	3 dokumen	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
21	Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Bulanan,Tri Wulanan,Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun)	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan (Dokumen lapporan keuangan bendahara pengeluaran,Laporan keunagan per Tri wulan,Laporan Keuangan Semesteran,CALK)	4 dokumen	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

F. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui pagu anggaran perubahan sebesar **Rp. 17.406.309.613** yang terdiri dari pagu anggaran untuk Belanja Tidak Langsung (gaji dan Tunjangan) **Rp. 5.193.504.989** dan Belanja Langsung Sebesar **Rp. 12.212.804.624** untuk 4 (empat) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 29 (dua sembilan) Sub Kegiatan dengan realisasi belanja Sebesar **89 %** dengan Realisasi Kinerja/Fisik dengan Persentase 99 %, adapun Rincian Program dan Alokasi Anggaran dapat dilihat pada Tabel berikut :

Rincian Program dan Realisasi Anggaran
UrusanPemberdayaanMasyarakat dan Desa Tahun
Anggaran 2023

NO	PROGRAM	ALOKASI	REALISASI (Rp)
A.	Belanja Tidak Langsung	5.193.504.989	4.363.439.848
B	Belanja Modal	316.544.300	265.565.000
C	Belanja Langsung :		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.734.005.111	5.831.676.194
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	723.433.798	612.896.400
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9.037.879.093	8.235.194.311
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	910.991.611	844.328.749
Total		17.406.309.613	15.524.095.654

Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 17.406.309.613,-** dengan **realisasi anggaran Rp. 15.524.095.654,-** dengan Program sebanyak 4 (empat) ,9 (sembilan) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan Pentaausahaan dan Pengujian/Verikasi Keuangan SKPD

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

B. Program Peningkatan Kerjasama Desa

1. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

- b. Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kawasan Perdesaan

C. Program Administrasi Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antarDesa
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa
- e. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa
- f. Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

D. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- c. Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- d. Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (Outcome) yang dicapai dalam tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut.

Akuntabilitas Kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolak ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut maka ditetapkan Indikator Kinerja. Capaian Indikator Kinerja ini akan dinilai, dianalisis dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan Evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2023, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam tahun sebelumnya, terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap) dilakukan analisa penyebab terjadinya celah

kinerja tersebut, serta tindakan – tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja masa mendatang.

Capaian Indikator Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing–masing indicator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing– masing indicator disajikan pada tabel pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tahun 2023.

Capaian indikator IKU ini untuk tahun 2023 ini merupakan capaian tahun kelima dalam Renstra Tahun 2018 – 2023 (RENSTRA Tahun ke 5). Hal ini akan menjadi parameter keberhasilan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.

SASARAN RPJMD

Visi	Terwujudnya Tanah Laut yang berinteraksi <ul style="list-style-type: none"> ➤ Berkarya ➤ Inovasi ➤ Tertata ➤ Religius ➤ Aktual ➤ Sinergi 		
Misi	Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Upaya membina Desa dan MenataKota	Indeks Desa Membangun (Persentase meningkatnya status desa)	1. Mendorong tertib administrasidalam Pemerintahan Desa	1. Pembinaan terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
		2. Mendorong partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa	2. Monitoring dan evaluasiterhadap pelaksanaan pemerintahan desa
		3. Mengoptimalkan peran aparatur baik di pemerintahandesa maupun lembaga kemasyarakatan	3. Pelatihan terhadap aparaturpemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
		4. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga Kemasyarakatan	

		5. Mengoptimalkan peran lembaga perekonomian desa dalam meningkatkan perekonomian desa	4. Pembinaan terhadap lembaga ekonomi desa
		6. Mendorong tertib administrasi pertanahan kawasan perdesaan	5. Pembinaan terhadap pemanfaatan lahan kawasan perdesaan
		7. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan kawasan perdesaan	6. Monitoring dan Evaluasi terhadap lahan kawasan perdesaan

1. Sasaran RPJMD

Indikator Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pembinaan Desa	1 Persentase Desa Kategori Maju	28	69	70,76 %
		2 Jumlah Desa di Bina Berciri Khas	5 Desa	7 Desa	140%
Rata-Rata Capaian Kinerja					252,71 %

Capaian Kinerja Terhadap Target 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2023		
			2021	2022	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Desa Kategori Maju	%	26	46,15	26	69	177,5 %
2	Jumlah Desa di Bina Berciri Khas	Desa	5	7	5	7	140%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							196,35%

a. Persentase Desa Kategori Maju

Untuk menghitung persentase desa kategori maju adalah dengan menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM). IDM adalah alat bantu “Teknokrasi” pengukuran perkembangan Status Kemandirian Desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan

pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa.

Realisasi indikator persentase desa kategori maju tahun 2023 adalah 70,76 %, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 28% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 252,71%. Mengalami peningkatan 24,61% jika dibandingkan dengan 46,15%.

Perhitungan persentase desa kategori maju diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Persentase desa kategori maju

$$= \frac{\text{Jumlah desa kategori maju (Maju dan Mandiri)}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$$

Jumlah desa

$$= \frac{92 \text{ Desa}}{130 \text{ Desa}} \times 100\%$$

130 Desa

$$= 70,76\%$$

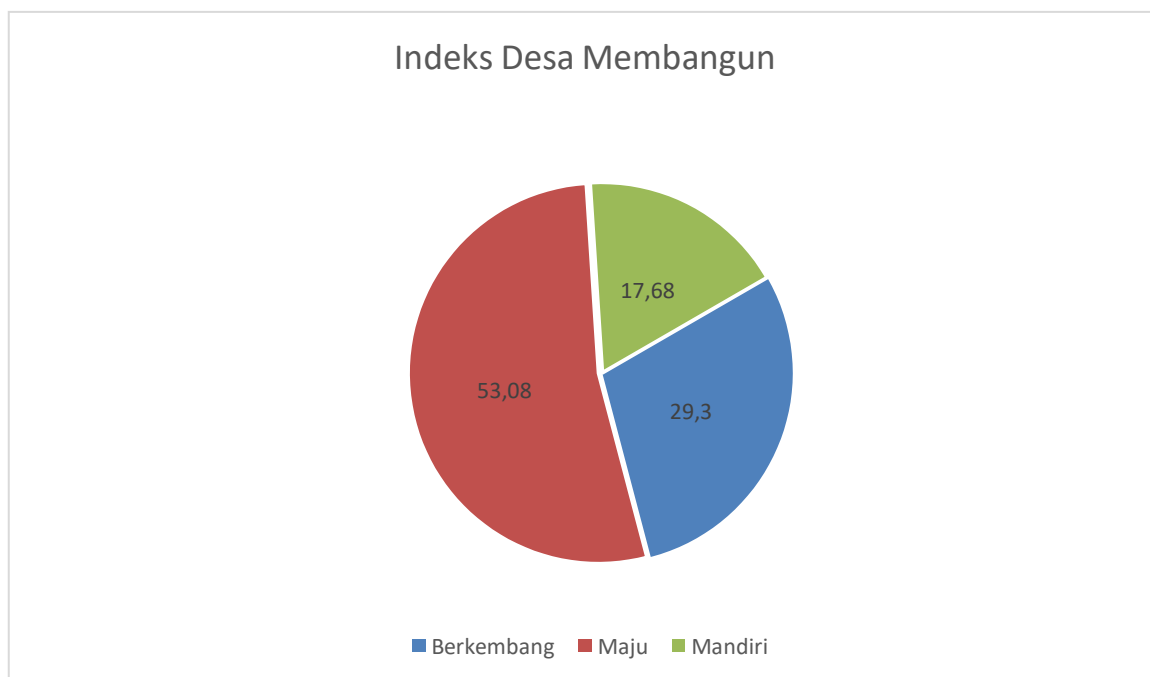
Tabel 3.5.67

Klasifikasi Status Indeks Desa Membangun Menurut Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	STATUS IDM				
			SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
1	TAKISUNG	12	-	-	5	5	2
2	JORONG	11	-	-	2	6	3
3	PELAIHARI	15	-	-	6	7	2
4	KURAU	11	-	-	1	9	1
5	BATI-BATI	14	-	-	0	12	2
6	PANYIPATAN	10	-	-	3	4	3
7	KINTAP	14	-	-	4	7	3
8	TAMBANG ULANG	9	-	-	6	2	1
9	BATU AMPAR	14	-	-	3	7	4
10	BAJUIN	9	-	-	1	7	1
11	BUMI MAKMUR	11	-	-	7	3	1
JUMLAH		130	-	-	38	69	23

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sudah tidak ada lagi Desa kategori sangat tertinggal dan tertinggal, 38 Desa kategori berkembang, 69 Desa kategori maju dan 23 Desa kategori mandiri dari total 130 desa se Kabupaten Tanah Laut.

Grafik 3.5.20
Indeks Desa Membangun



Persentase Desa Kategori Maju Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 terealisasi sebesar 70,76%, mengalami peningkatan sebesar 24,61% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 40,00%. Untuk tahun 2022 terdapat 8 desa mandiri dan 0 desa tertinggal sedangkan di tahun 2023 terdapat 23 desa dengan kategori mandiri dan sudah tidak ada lagi desa dengan kategori tertinggal.

Tabel 3.5.68

Kriteria Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023

No	Kriteria IDM	Jumlah Desa				2023
		2019	2020	2021	2022	
1	Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0
2	Tertinggal	15	4	2	0	0
3	Berkembang	89	98	85	70	38
4	Maju	25	26	40	52	69
5	Mandiri	0	2	3	8	23
Jumlah		130	130	130	130	130

Indikator yang digunakan dalam menetapkan status desa dalam indeks desa membangun adalah IKS : Indeks Ketahanan Sosial, IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi, IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi). Sedangkan klasifikasi status desa dibedakan menjadi lima (5) status, yakni : (i) Desa sangat tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri.

Tabel 3.5.69
Klasifikasi Desa

No	Status Desa	Nilai Batas
1.	Sangat tertinggal	$\leq 0,4907$
2.	Tertinggal	$> 0,4907$ dan $\leq 0,5989$
3.	Berkembang	$> 0,5989$ dan $\leq 0,7072$
4.	Maju	$> 0,7072$ dan $\leq 0,8155$
5.	Mandiri	$> 0,8155$

Ada 3 pendekatan yang diambil oleh Kementerian Desa PDTT untuk mendorong desa semakin lebih cepat dalam melaksanakan pembangunan. Pertama, Jaring Komunitas Wiradesa. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbanyak kesempatan dan pilihan masyarakat desa dalam upaya menegakkan hak dan martabatnya, serta

peningkatan memajukan kesejahteraan, baik sebagai individu, keluarga maupun kolektiva. Sampai saat ini masalah yang dihadapi masyarakat desa adalah ketidakberdayakan dan marjinalisasi. Masalah inilah yang menjadi faktor utama penyebab kemiskinan di wilayah pedesaan. Oleh sebab itu diharapkan dengan Jaringan Komunitas Desa ini mampu mendorong ekspansi kapabilitas dengan memperkuat daya pada berbagai aspek kehidupan manusia warga Desa yang menjangkau aspek nilai dan moral, serta pengetahuan Lokal Desa.

Kedua, Lumbung Ekonomi Desa. Desa sebagai jenis entitas wilayah terkecil. Dalam suatu Negara, memiliki potensi sumber daya yang sangat beragam. Ketika potensi tersebut mampu untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa sendiri maka akan menjadi lumbung komoditas ekonomi. Pengembangan lumbung ekonomi tidak akan pernah lepas dengan masalah modal, jaringan dan informasi. Oleh karena itu lembaga ekonomi yang dibentuk di desa harusnya sudah mempunyai kapasitas dan kualitas yang sudah mumpuni. Dalam Konteks ini BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) sebagai penggerak perekonomian harus mampu dan tanggap dengan kesempatan dan peluang ekonomi yang bias dikembangkan. Ketiga, Lingkar Budaya Desa. Budaya desa merupakan ruh keterkaitan emosional warga yang terbentuk dari kebersamaan persaudaraan, kekerabatan dan kolektivitas yang mengakar lama dalam masyarakat. Budaya desa yang seperti ini akan mampu mengarahkan, membimbing secara kolektif untuk tetap pada jalur dan tujuan program pembangunan. Norma dan nilai budaya desa yang telah ada sejak lama secara otomatis akan mengontrol program tersebut hingga menghasilkan kemajuan hingga sampai pada kesejahteraan masyarakat. Tiga pendekatan inilah yang kemudian menghasilkan tiga kategori dalam melakukan penilaian keberhasilan program pembangunan desa atau yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi (Lingkungan).

Tabel 3.5.70
Klasifikasi Status Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

NO	KRITERIA IDM	JUMLAH DESA
1	Sangat Tertinggal	0
2	Tertinggal	0
3	Berkembang	38
4	Maju	69
5	Mandiri	23
Jumlah		130

Derap pembangunan di wilayah perdesaan di Kabupaten Tanah Laut terus melaju pesat. Pembangunan di Kabupaten Tanah Laut mulai terus ditingkatkan dari tahun 2020 sampai sekarang, khususnya mengenai perkembangan kemajuan di 130 Desa. Dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri, maka diperlukan ketersediaan data dasar Pembangunan Desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana ketentuan Permendes PD TT-RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasar Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi Desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri.

Target kenaikan status Desa selain didasarkan pada capaian prestisius tahun lalu, juga dikarenakan masifnya pembangunan di seluruh Desa di Kabupaten Tanah Laut. Baik yang mempergunakan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) serta berbagai sumber pendapatan lainnya.

Dari 130 desa di Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari 11 Kecamatan, pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal. Untuk Desa Berkembang pada tahun 2022 sebanyak 70 Desa (53,85 persen) turun menjadi 38 Desa (29,23 persen) pada tahun 2023. Desa Maju pada tahun 2022 sebanyak 52 Desa (40,00 persen) naik menjadi 69 Desa (53,08 persen) pada tahun 2023. Dan Desa Mandiri pada tahun sebelumnya ada 8 Desa (6,15 persen) sekarang pada tahun 2023 menjadi 23 Desa (17,69 persen).

Dalam upaya menjalankan strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa di Kabupaten Tanah Laut telah dibuat dan diterbitkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2022 tentang Strategi Pencapaian Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Dimana perlu dilakukan secara terpadu dan koordinasi, dengan melibatkan berbagai SKPD, terkait sasaran pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil analisa IDM Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dan Keputusan Menteri Desa, PDT & Trans RI Nomor 175 Tahun 2023 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023, di Kabupaten Tanah Laut terdapat 23 (Dua Puluh Tiga) Desa Mandiri, 69 (Enam Puluh Sembilan) Desa Maju dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Desa Berkembang, tidak ada lagi Desa berstatus Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Dan pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Kabupaten terbaik pertama atas prestasi pembangunan dalam peningkatan status dan kemandirian Desa, dalam menolak / tidak ada lagi Desa berstatus Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal, dan Pemberian Penghargaan Desa Dengan Status Mandiri Tahun 2022 dari Menteri Desa, PDT dan Trans kepada Desa Batu Ampar Kec. Batu Ampar, Desa Kait-Kait Baru dan Desa Padang Kec. Bati-Bati, Desa Jorong dan Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong, Desa Bukit Mulya Kec. Kintap, Desa Batu Mulya Kec. Panyipatan dan Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari berdasarkan Keputusan Menteri Desa, PDT dan Trans RI Nomor 105 Tahun 2022, dan ada 23 (dua puluh tiga) Desa mendapat piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan atas prestasi dalam pembangunan sebagai Desa dengan Peningkatan Status Desa nya, dari Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang, dari Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

Komitmen dan kesungguhan Pemerintah pada semua tingkatan mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Dan tidak ketinggalan partisipasi para Pendamping Desa serta semua pihak yang terkait. Karena itu, sinergi harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan, sehingga status Desa Tertinggal tidak ada lagi di Kabupaten Tanah Laut ini, semuanya sudah naik menjadi Desa Berkembang, Maju dan Desa Mandiri.

Pembangunan desa merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sehingga banyak upaya yang dilakukan diantaranya:

1. Program peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa Sebesar 50%, dari

tahun 2018 – hingga 2023 nanti. Pada tahun 2021 dan 2022 Desa dapat membangun desa dalam segala dimensi, baik itu pembangunan infrastruktur (jalan desa, saluran irigasi, jalan pertanian) yang memudahkan akses masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, kegiatan pagelaran budaya di desa, peningkatan kualitas sumberdaya manusia desa melalui kegiatan pelatihan kepada pemuda di desa misalnya tata rias, memasak, perbengkelan dan lain-lain.

2. Komitmen dari Pemerintah Pusat Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan upaya sebagai berikut:
 - a. Memberikan Reward atau penghargaan kepada desa yang telah naik status desanya dari Kategori Desa Maju menjadi Kategori Desa Mandiri dengan memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dengan Kategori Mandiri. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut. Pengalokasian besaran BKK setiap Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Desa dengan status IDM Mandiri diberikan maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - b. Desa yang mendapatkan penunjukan Program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap program.
 - b. Melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan SKPD lain (Focus Group Discussion/FGD) dalam rangka bersama-sama menjadikan desa-desa yang berkembang menjadi maju dan mandiri yang merupakan sasaran dari forum ini sehingga semua program yang ada di masing-masing SKPD dapat bersinergi yang sudah barang tentu untuk peningkatan status desa tersebut.
 - b. Mengawal penggunaan ADD desa dengan melaksanakan monitoring serta evaluasi penggunaan DD dan ADD yang dikucurkan pemerintah pada desa-desa yang status desanya masih sangat tertinggal dan tertinggal apakah sudah sesuai dan mendukung dalam peningkatan status desanya.
 - c. Melakukan penguatan Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPM dll) serta BumDes melalui kegiatan bimtek/pelatihan/pembinaan agar mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya

masing-masing untuk mendukung percepatan peningkatan status desa.

- d. Melaksanakan pembinaan desa yang memiliki ciri khas untuk terus meingkatkan potensi desa melalui kerjasama dengan SKPD terkait, agar menumbuhkan usaha-usaha kecil di desa.

Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selain terus melaksanakan kegiatan kegiatan yang baik yang telah dilaksanakan dan perbaikan-perbaikan yang masih dianggap kurang juga akan menjalankan strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa yaitu meningkatkan keterpaduan, koordinasi, dengan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, terkait sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan kemandirian Desa di Kabupaten Tanah Laut.

a. Jumlah Desa Dibina Berciri Khas

Dalam rangka mempercepat Pembangunan Desa dan Pembangunan Masyarakat Desa, di Kabupaten Tanah Laut juga telah terbentuk Desa Berciri Khas. Desa Berciri Khas yaitu Desa yang memiliki karakteristik khusus yang dapat ditinjau dari aspek sosial budaya, masyarakat Desa setempat masih mempertahankan tradisi turun temurun dalam kehidupan sosial dan budaya. Sementara pada aspek geografi tergantung dari potensi alam tempat tinggal masyarakat Desa. Kebanyakan masih menggantungkan hidup dengan kondisi alam setempat sesuai potensi alamnya, misalnya daerah pesisir yang rata-rata adalah nelayan.

Sedangkan warga yang hidup dipinggiran hutan akan mengandalkan potensi hutan setempat utk bertahan hidup. Sementara dari aspek SDM yaitu masyarakat Desa setempat memiliki keterampilan khusus sebagai mata pencaharian yang mana mereka hidup dari industri kerajinan atau Desa pengrajin dan rata-rata biasanya bersifat homogen.

Jadi Desa Berciri Khas sesuai karateristik desa masing-masing tersebut dengan potensi yang ada perlu digali, dipertahankan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa setempat dan sekaligus pelestarian alam dapat terjaga dengan baik.

Realisasi indikator Jumlah Desa di bina berciri khas di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 terealisasi sebanyak 7 desa dari target 5 desa, sehingga capaian kinerja

jumlah desa dibina berciri khas adalah sebesar 140%. Realisasi tersebut sudah mencapai 100% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu total 25 Desa.

Ke 7 (tujuh) desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan
2. Desa Telaga Kecamatan Pelaihari
3. Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung
4. Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari
5. Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari
6. Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur
7. Desa Batakan Kecamatan Panyipatan

Jumlah Desa dibina berciri khas tahun 2023 adalah sebanyak 7 Desa. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 7 Desa. Berikut daftar desa di bina berciri khas tahun 2022 dan 2023.

Tabel 3.5.71
Desa dibina berciri khas 2021 – 2023

No	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau	Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur	Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan
2	Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati	Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati	Desa Telaga Kecamatan Pelaihari
3	Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan	Desa Kali Besar Kecamatan Kurau	Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung
4	Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang	Desa Damit Kecamatan Batu Ampar	Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari
5	Desa Tanjung Kecamatan Bajuin	Desa Guntung Besar Kecamatan Pelaihari	Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari
6	Desa Tungkaran kecamatan Pelaihari	Desa Tabanio Kecamatan Takisung	Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur
7		Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap	Desa Batakan Kecamatan Panyipatan

Pada Tahun 2023 telah dilakukan kegiatan pencaangan desa berciri khas di Tanah Laut yang kemudian dilakukan pembinaan. Untuk desa yang dibina berciri khas dari 5 desa yang ditargetkan dan terealisasi sebanyak 7 desa berciri khas.

Berikut kegiatan koordinasi Desa Berciri Khas yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2023 :

1. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas yang dihadiri oleh Kepala SKPD/ yang mewakili, Tujuh Kecamatan yang ditunjuk berciri khas. Kecamatan tersebut memilih Desa yang mempunyai ciri khasnya.
2. Rapat koordinasi dan konsolidasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas yang dihadiri oleh Bupati Tanah Laut, Kepala SKPD/ yang mewakili, Tujuh Kecamatan dan Tujuh Kepala Desa yang ditunjuk berciri khas yaitu Desa Sukaramah Kec. Panyipatan, Desa Telaga Kec. Pelaihari, Desa Ranggung Dalam Kec. Takisung, Desa Ambungan Kec. Pelaihari, Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari, Desa Handil Babirik Kec. Bumi Makmur dan Desa Batakan Kec. Panyipatan. Desa tersebut mempunyai beragam karakteristiknya masing-masing Desa, wisata, Kountur budaya dan alamnya.
3. Pencanangan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Suramah Kecamatan Panyipatan, desa yang memiliki potensi beragam tumbuh-tumbuhan. Yang diputuskan dinamakan Kampung Holtikultura. Diikuti oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut beserta undangan.
4. Pencanangan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Telaga Kecamatan Pelaihari, desa yang memiliki potensi beragam budi daya madu. Yang diputuskan dinamakan Kampung Madu Lebah. Diikuti oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut beserta undangan.
5. Pencanangan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung, desa yang memiliki potensi pembuatan serta pembakaran kayu. Yang diputuskan dinamakan Kampung Harang. Diikuti oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut beserta undangan.
6. Pencanangan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari, desa yang memiliki potensi ternak sapi. Yang diputuskan dinamakan Kampung Susu Sapi Murni. Diikuti oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut beserta undangan.
7. Pencanangan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari, desa yang memiliki potensi beragam tanaman pisang. Yang diputuskan dinamakan

Kampung Pisang Tundang. Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut dan undangan.

8. Pencanangan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur, desa yang memiliki potensi beragam buah-buahan. Yang diputuskan dinamakan Kampung Kasturi. Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut dan undangan.
9. Pencanangan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Batakan Kecamatan Panyipatan, desa yang memiliki potensi beragam hasil tangkapan ikan. Yang diputuskan dinamakan Kampung Kerupuk. Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut dan undangan.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya pembinaan desa di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 30 ASN serta 20 PTT pada Dinas PMD dan di dukung oleh 4 Program dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 17.406.309.613,00 dan terealisasi Rp. 15.524.095.654,00 atau sebesar 89%.

Tabel 3.1.72
Realisasi Program Dinas PMD

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.734.005.111,00	5.831.676.194,00
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	723.433.798,00	612.896.400,00
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.037.879.093,00	8.235.194.311,00
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	910.991.611,00	844.328.749,00
		17.406.309.613,00	15.524.095.654,00

2. Eselon II

Berdasarkan Target dan Realisasi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Eselon II yang ditetapkan pada tahun 2023 telah terealisasi sesuai yang diinginkan, sehingga dengan demikian apa yang menjadi Visi, Misi dan Bupati Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan dokumen Renstra SKPD yang telah targetkan. Dasar perhitungan indikator ini masih menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai dasar perhitungan meningkatnya status desa

dengan target 20%. Penjelasan analisa capaian IKU dapat di lihat di bawah ini :

Tabel 3.1

Tabel Target dan Realisasi IKU

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Indeks Desa Membangun (Persentase meningkatnya status desa)	Persentase Klasifikasi Status Desa	20%	36,15%	180%

1). Perbandingan Realisasi dengan Target

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

“ Persentase Klasifikasi Status Desa “

Realisasi sasaran pada indikator ini dimaksudkan untuk meningkatkan status desa dengan Formulasi Penghitungan dalam indikator Kinerja ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Desa yang naik statusnya}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100 \%$$

$$\frac{47}{130} \times 100 \% = 36,15\%$$

Pada Tahun 2023 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut untuk Persentase Klasifikasi Status Desa yang ditargetkan 20% tercapai 36,15%. Dibandingkan pada tahun 2022 ada kenaikan capaian sebesar 17,69% secara target melebihi dari yang ditargetkan/tercapai yang merupakan Kondisi tahun kelima dari Target Renstra 5 Tahunan, dari target 20% atau target yang direncanakan membentuk meningkatkan klasifikasi status desa dari 20% terealisasi sebesar 36,15% atau sebanyak 47 desa dari 130 desa yang mengalami kenaikan status desa. Hal ini didukung oleh Komitmen dan Niat Desa untuk meningkatkan klasifikasi status desa dengan menyesuaikan keadaan Potensial Desa dan beberapa kegiatan pendukung lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut Melalui Program, kegiatan dan sub kegiatan. Perbandingan realiasi dan target yang di targetkan berdasarkan IDM pada Kabupaten

Hulu Sungai Selatan yang dijadikan sebagai bahan perbandingan terdapat hasil sebagai berikut Realisasi Kabupaten Tanah Laut sebesar 36, 15 % sedangkan Kabupaten HSS yang mempunyai IKU sama dengan Kabupaten Tanah Laut sebesar 25, 69 %

PROGRESS INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2023

NO	NAMA KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
1	TANAH LAUT	TAKISUNG	BENUA LAWAS	0.7314	0.7333	0.6	0.6883	BERKEMBANG
2	TANAH LAUT	TAKISUNG	TABANIO	0.6686	0.7	0.6	0.6562	BERKEMBANG
3	TANAH LAUT	TAKISUNG	KUALA TAMBANGAN	0.7314	0.6	0.6	0.6438	BERKEMBANG
4	TANAH LAUT	TAKISUNG	TAKISUNG	0.8057	0.7333	0.9333	0.8241	MANDIRI
5	TANAH LAUT	TAKISUNG	GUNUNG MAKMUR	0.8743	0.7833	0.8	0.8192	MANDIRI
6	TANAH LAUT	TAKISUNG	BENUA TENGAH	0.84	0.85	0.6	0.7633	MAJU
7	TANAH LAUT	TAKISUNG	RANGGANG	0.7886	0.6833	0.6667	0.7129	MAJU
8	TANAH LAUT	TAKISUNG	PAGATAN BESAR	0.7771	0.6833	0.6	0.6868	BERKEMBANG
9	TANAH LAUT	TAKISUNG	BATILAI	0.7714	0.6333	0.8667	0.7571	MAJU
10	TANAH LAUT	TAKISUNG	RANGGANG DALAM	0.72	0.5667	0.8	0.6956	BERKEMBANG
11	TANAH LAUT	TAKISUNG	TELAGA LANGSAT	0.7657	0.55	0.8667	0.7275	MAJU
12	TANAH LAUT	TAKISUNG	SUMBER MAKMUR	0.8286	0.55	0.8667	0.7484	MAJU
13	TANAH LAUT	JORONG	SABUHUR	0.76	0.6333	0.6	0.6644	BERKEMBANG
14	TANAH LAUT	JORONG	JORONG	0.8571	0.8333	0.8	0.8302	MANDIRI
15	TANAH LAUT	JORONG	ASAM-ASAM	0.8343	0.6	0.8	0.7448	MAJU
16	TANAH LAUT	JORONG	BATALANG	0.8229	0.5333	0.6667	0.6743	BERKEMBANG
17	TANAH LAUT	JORONG	SWARANGAN	0.76	0.6	0.8667	0.7422	MAJU
18	TANAH LAUT	JORONG	MUARA ASAM-ASAM	0.7543	0.6667	0.7333	0.7181	MAJU
19	TANAH LAUT	JORONG	ALUR	0.7771	0.7	0.6667	0.7146	MAJU
20	TANAH LAUT	JORONG	ASRI MULYA	0.8229	0.5667	0.8667	0.7521	MAJU
21	TANAH LAUT	JORONG	KARANG REJO	0.8686	0.7	0.8667	0.8117	MAJU
22	TANAH LAUT	JORONG	ASAM JAYA	0.8057	0.7167	0.9333	0.8186	MANDIRI
23	TANAH LAUT	JORONG	SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU	0.8629	0.85	0.9333	0.8821	MANDIRI
24	TANAH LAUT	PELAIHARI	BUMI JAYA	0.8971	0.7667	0.8667	0.8435	MANDIRI
25	TANAH LAUT	PELAIHARI	SUNGAI RIAM	0.8343	0.5667	0.8	0.7337	MAJU
26	TANAH LAUT	PELAIHARI	TAMPANG	0.8	0.7333	0.6667	0.7333	MAJU
27	TANAH LAUT	PELAIHARI	TELAGA	0.7714	0.5667	0.6667	0.6683	BERKEMBANG
28	TANAH LAUT	PELAIHARI	PANJARATAN	0.68	0.6333	0.7333	0.6822	BERKEMBANG
29	TANAH LAUT	PELAIHARI	ATU-ATU	0.8	0.5667	0.8	0.7222	MAJU
30	TANAH LAUT	PELAIHARI	PANGGUNG	0.8343	0.65	0.8667	0.7837	MAJU
31	TANAH LAUT	PELAIHARI	TUNGKARAN	0.7657	0.65	0.6667	0.6941	BERKEMBANG
32	TANAH LAUT	PELAIHARI	UJUNG BATU	0.72	0.7	0.6667	0.6956	BERKEMBANG
33	TANAH LAUT	PELAIHARI	PANGGUNG BARU	0.7486	0.6667	0.6667	0.694	BERKEMBANG
34	TANAH LAUT	PELAIHARI	AMBUNGAN	0.8286	0.7333	0.8667	0.8095	MAJU
35	TANAH LAUT	PELAIHARI	GUNTUNG BESAR	0.6914	0.55	0.6	0.6138	BERKEMBANG
36	TANAH LAUT	PELAIHARI	KAMPUNG BARU	0.8343	0.7667	0.6667	0.7559	MAJU
37	TANAH LAUT	PELAIHARI	SUMBER MULIA	0.8629	0.9667	0.6667	0.8321	MANDIRI
38	TANAH LAUT	PELAIHARI	PEMUDA	0.8514	0.65	0.7333	0.7449	MAJU
39	TANAH LAUT	KURAU	SUNGAI BAKAU	0.7429	0.5833	0.8	0.7087	MAJU
40	TANAH LAUT	KURAU	MALUKA BAULIN	0.8343	0.6167	0.8	0.7503	MAJU

41	TANAH LAUT	KURAU	BAWAH LAYUNG	0.7657	0.75	0.7333	0.7497	MAJU
42	TANAH LAUT	KURAU	TAMBAK SARINAH	0.7143	0.6167	0.8	0.7103	MAJU
43	TANAH LAUT	KURAU	KALI BESAR	0.7829	0.5667	0.6667	0.6721	BERKEMBANG
44	TANAH LAUT	KURAU	HANDIL NEGARA	0.7143	0.5833	0.8667	0.7214	MAJU
45	TANAH LAUT	KURAU	PADANG LUAS	0.8743	0.7333	0.8667	0.8248	MANDIRI
46	TANAH LAUT	KURAU	KURAU	0.7943	0.6833	0.8667	0.7814	MAJU
47	TANAH LAUT	KURAU	TAMBAK KARYA	0.7886	0.7	0.8667	0.7851	MAJU
48	TANAH LAUT	KURAU	RADEN	0.7829	0.65	0.8	0.7443	MAJU
49	TANAH LAUT	KURAU	SARIKANDI	0.7771	0.6667	0.8	0.7479	MAJU
50	TANAH LAUT	BATI BATI	BENUA RAYA	0.8571	0.7667	0.8	0.8079	MAJU
51	TANAH LAUT	BATI BATI	BATI-BATI	0.8229	0.7667	0.6	0.7298	MAJU
52	TANAH LAUT	BATI BATI	UJUNG	0.92	0.6833	0.6667	0.7567	MAJU
53	TANAH LAUT	BATI BATI	LIANG ANGGANG	0.8571	0.6	0.7333	0.7302	MAJU
54	TANAH LAUT	BATI BATI	BENTOK KAMPUNG	0.9086	0.7167	0.6	0.7417	MAJU
55	TANAH LAUT	BATI BATI	BENTOK DARAT	0.8571	0.6833	0.8667	0.8024	MAJU
56	TANAH LAUT	BATI BATI	BANYU IRANG	0.9086	0.7	0.8	0.8029	MAJU
57	TANAH LAUT	BATI BATI	NUSA INDAH	0.7943	0.8	0.7333	0.7759	MAJU
58	TANAH LAUT	BATI BATI	PANDAHAN	0.8	0.7	0.7333	0.7444	MAJU
59	TANAH LAUT	BATI BATI	PADANG	0.9543	0.8333	0.8667	0.8848	MANDIRI
60	TANAH LAUT	BATI BATI	UJUNG BARU	0.8057	0.6167	1	0.8075	MAJU
61	TANAH LAUT	BATI BATI	SAMBANGAN	0.6971	0.6667	0.8667	0.7435	MAJU
62	TANAH LAUT	BATI BATI	KAIT-KAIT	0.8571	0.5167	0.8	0.7246	MAJU
63	TANAH LAUT	BATI BATI	KAIT-KAIT BARU	0.8	0.8	0.8667	0.8222	MANDIRI
64	TANAH LAUT	PANYIPATAN	BATU TUNGKU	0.7657	0.6667	0.6667	0.6997	BERKEMBANG
65	TANAH LAUT	PANYIPATAN	PANYIPATAN	0.9257	0.6667	0.6667	0.753	MAJU
66	TANAH LAUT	PANYIPATAN	KANDANGAN BARU	0.7886	0.55	0.6667	0.6684	BERKEMBANG
67	TANAH LAUT	PANYIPATAN	KANDANGAN LAMA	0.76	0.6333	0.9333	0.7756	MAJU
68	TANAH LAUT	PANYIPATAN	BATAKAN	0.9143	0.8	0.8	0.8381	MANDIRI
69	TANAH LAUT	PANYIPATAN	KURINGKIT	0.7886	0.6833	0.8667	0.7795	MAJU
70	TANAH LAUT	PANYIPATAN	TANJUNG DEWA	0.7714	0.7	1	0.8238	MANDIRI
71	TANAH LAUT	PANYIPATAN	SUKA RAMAH	0.8743	0.7333	0.6667	0.7581	MAJU
72	TANAH LAUT	PANYIPATAN	BATU MULYA	0.8971	0.7167	1	0.8713	MANDIRI
73	TANAH LAUT	PANYIPATAN	BUMI ASIH	0.7314	0.5167	0.8667	0.7049	BERKEMBANG
74	TANAH LAUT	KINTAP	PANDAN SARI	0.76	0.7	0.8	0.7533	MAJU
75	TANAH LAUT	KINTAP	KINTAP	0.7371	0.55	0.8	0.6957	BERKEMBANG
76	TANAH LAUT	KINTAP	KINTAPURA	0.9257	0.8667	0.6667	0.8197	MANDIRI
77	TANAH LAUT	KINTAP	SUNGAI CUKA	0.8686	0.8167	0.6	0.7617	MAJU
78	TANAH LAUT	KINTAP	RIAM ADUNGAN	0.7657	0.5333	0.5333	0.6108	BERKEMBANG
79	TANAH LAUT	KINTAP	MUARA KINTAP	0.8057	0.7333	0.7333	0.7575	MAJU
80	TANAH LAUT	KINTAP	SALAMAN	0.7829	0.65	0.6	0.6776	BERKEMBANG
81	TANAH LAUT	KINTAP	KINTAP KECIL	0.8914	0.9667	0.5333	0.7971	MAJU
82	TANAH LAUT	KINTAP	PASIR PUTIH	0.9543	0.8	0.6	0.7848	MAJU
83	TANAH LAUT	KINTAP	SUMBER JAYA	0.8857	0.8333	0.6	0.773	MAJU
84	TANAH LAUT	KINTAP	BUKIT MULIA	0.9257	0.8833	1	0.9363	MANDIRI
85	TANAH LAUT	KINTAP	KEBUN RAYA	0.8457	0.7167	0.9333	0.8319	MANDIRI
86	TANAH LAUT	KINTAP	MEKAR SARI	0.8229	0.75	0.5333	0.7021	BERKEMBANG

87	TANAH LAUT	KINTAP	SEBAMBAN BARU	0.8457	0.75	0.7333	0.7763	MAJU
88	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	TAMBANG ULANG	0.7886	0.6	0.6667	0.6851	BERKEMBANG
89	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	SUNGAI PINANG	0.8686	0.5833	0.6	0.684	BERKEMBANG
90	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	MARTADAH	0.8171	0.6667	0.6	0.6946	BERKEMBANG
91	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	SUNGAI JELAI	0.84	0.5333	0.6667	0.68	BERKEMBANG
92	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	BINGKULU	0.7314	0.5667	0.8667	0.7216	MAJU
93	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	GUNUNG RAJA	0.8457	0.5667	0.8	0.7375	MAJU
94	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	PULAU SARI	0.8286	0.6333	0.6	0.6873	BERKEMBANG
95	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	KAYU ABANG	0.8	0.55	0.5333	0.6278	BERKEMBANG
96	TANAH LAUT	TAMBANG ULANG	MARTADAH BARU	0.88	0.8667	0.9333	0.8933	MANDIRI
97	TANAH LAUT	BATU AMPAR	BATU AMPAR	0.9143	0.9	0.9333	0.9159	MANDIRI
98	TANAH LAUT	BATU AMPAR	GUNUNG MAS	0.8743	0.7	0.6667	0.747	MAJU
99	TANAH LAUT	BATU AMPAR	TAJAU MULYA	0.7543	0.7	0.6667	0.707	BERKEMBANG
100	TANAH LAUT	BATU AMPAR	JILATAN	0.8914	0.7	0.6667	0.7527	MAJU
101	TANAH LAUT	BATU AMPAR	DURIAN BUNGKUK	0.8686	0.6667	1	0.8451	MANDIRI
102	TANAH LAUT	BATU AMPAR	AMBAWANG	0.7371	0.6167	0.8667	0.7402	MAJU
103	TANAH LAUT	BATU AMPAR	DAMIT	0.8857	0.6833	0.8667	0.8119	MAJU
104	TANAH LAUT	BATU AMPAR	GUNUNG MELATI	0.8514	0.7167	0.6667	0.7449	MAJU
105	TANAH LAUT	BATU AMPAR	BLURU	0.8457	0.75	0.8667	0.8208	MANDIRI
106	TANAH LAUT	BATU AMPAR	PANTAI LINUH	0.8457	0.7	0.6667	0.7375	MAJU
107	TANAH LAUT	BATU AMPAR	DAMIT HULU	0.7257	0.4667	0.6667	0.6197	BERKEMBANG
108	TANAH LAUT	BATU AMPAR	JILATAN ALUR	0.9029	0.8833	0.6667	0.8176	MANDIRI
109	TANAH LAUT	BATU AMPAR	DAMAR LIMA	0.8	0.6167	0.6667	0.6944	BERKEMBANG
110	TANAH LAUT	BATU AMPAR	TAJAU PECAH	0.8171	0.7	0.6667	0.7279	MAJU
111	TANAH LAUT	BAJUIN	BAJUIN	0.8343	0.7	0.6667	0.7337	MAJU
112	TANAH LAUT	BAJUIN	SUNGAI BAKAR	0.8286	0.5167	0.8667	0.7373	MAJU
113	TANAH LAUT	BAJUIN	KETAPANG	0.8343	0.5167	0.9333	0.7614	MAJU
114	TANAH LAUT	BAJUIN	TIRTA JAYA	0.8743	0.7	1	0.8581	MANDIRI
115	TANAH LAUT	BAJUIN	GALAM	0.7829	0.6167	1	0.7998	MAJU
116	TANAH LAUT	BAJUIN	PEMALONGAN	0.76	0.7167	0.6	0.6922	BERKEMBANG
117	TANAH LAUT	BAJUIN	KUNYIT	0.8571	0.6833	0.6667	0.7357	MAJU
118	TANAH LAUT	BAJUIN	TEBING SIRING	0.8514	0.7333	0.8	0.7949	MAJU
119	TANAH LAUT	BAJUIN	TANJUNG	0.8057	0.6	0.7333	0.713	MAJU
120	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	HANDIL BABIRIK	0.8457	0.7667	0.9333	0.8486	MANDIRI
121	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	KURAU UTARA	0.88	0.5667	0.6	0.6822	BERKEMBANG
122	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	BUMI HARAPAN	0.7429	0.6	0.6667	0.6698	BERKEMBANG
123	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	SUNGAI RASAU	0.7771	0.7333	0.8667	0.7924	MAJU
124	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	PANTAI HARAPAN	0.7486	0.4333	0.8	0.6606	BERKEMBANG
125	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	HANDIL SURUK	0.8514	0.5333	0.7333	0.706	BERKEMBANG
126	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	HANDIL GAYAM	0.7429	0.6167	0.8	0.7198	MAJU
127	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	HANDIL BIRAYANG ATAS	0.7143	0.5833	0.8	0.6992	BERKEMBANG

128	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	HANDIL BIRAYANG BAWAH	0.7429	0.5833	0.8	0.7087	MAJU
129	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	HANDIL MALUKA	0.72	0.45	0.8667	0.6789	BERKEMBANG
130	TANAH LAUT	BUMI MAKMUR	HANDIL LABUAN AMAS	0.6514	0.55	0.6667	0.6227	BERKEMBANG

2). Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Realisasi kinerja tahun 2023 yang dicapai dengan perbandingan tahun 2022 terdapat kenaikan 24 desa, ini karena kenaikan klasifikasi status desa (semua kenaikan klasifikasi) yang pada 2022 sebesar 18,46%, sedangkan tahun 2023 sebesar 36,15%.

Sedangkan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya terdapat kenaikan setiap tahunnya. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target sudah tercapai, sesuai dengan yang ditargetkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

REKAP INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2021 - 2023
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KRITERIA IDM	JUMLAH DESA		
		2021	2022	2023
	Rata -Rata nilai IDM			
1	Sangat Tertinggal	0	0	0
2	Tertinggal	2	0	0
3	Berkembang	85	70	38
4	Maju	40	52	69
5	Mandiri	3	8	23
JUMLAH		130	130	130

3). Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Upaya yang dilakukan pada tahun 2023 yang dicapai Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk persentase klasifikasi status desa yang di targetkan 20% tercapai 36,15% dengan melakukan pelatihan maupun bimtek-bimtek bagi aparat desa. Dalam menentukan sebuah perhitungan status peningkatan desa dalam pelaksanaannya harus benar-benar cermat dalam memperhitungkan beberapa indikator yang menjadi acuan/standart dalam menentukan sebuah penilaian. Secara umum klasifikasi status desa untuk tahun 2023 sudah ada 23 desa yang menjadi desa mandiri, jadi Indeks Desa Membangun (IDM) ini disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dandesa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu proses dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan desa.

Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM) untuk persentase klasifikasi status desa agar bias digunakan sebagai basis data pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemadirian desa, salah satu input dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, masukan dalam perumusan targetting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrument koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Upaya yang dilakukan dalam langkah efisiensi program/kegiatan/sub kegiatan telah dilakukan yang tertuang dalam beberapa program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan anggaran perubahan. Tujuan efisiensi dilakukan dalam pemenuhan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercantum dalam awal pelaksanaan kegiatan. Dalam program/kegiatan/sub kegiatan ada beberapa yang tidak dapat dilaksanakan dalam pemenuhan sebuah kegiatan yang tidak tercapai sesuai target, sehingga akan lebih efisien digeser/dipindah program/kegiatan/sub kegiatan yang lebih utama.

Dalam upaya untuk meningkatkan dalam capaian kinerja ASN, Dinas PMD memberikan reward atau penghargaan serta hadiah berupa uang pembinaan. Hal ini telah dilaksanakan pada tahun berjalan (pada bulan Januari 2024).

4). Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada dalam menunjang tercapainya IKU terdiri dari :

1. 1 orang sekretaris,
2. 3 orang kabid ,
3. 2 orang kasubbag,
4. 17 orang pelaksana serta
5. 20 orang PTT.

5). Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
A.	Belanja Tidak Langsung	5.193.504.989	4.014.179.285	77
	Belanja Pegawai			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.193.504.989	4.014.179.285	77
B	Belanja Langsung	12.212.804.624	10.205.022.919	83
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.540.500.122	5.387.242.069	87
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	723.433.789	122.188.000	84
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9.037.879.093	2.915.472.445	91
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	910.991.611	1.522.116.405	87
Total		17.406.309.63	15.475.141.654	89

6). Kendala dan Rencana Aksi

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU ada beberapa point yaitu :

- a) Kurangnya capaian indikator ekonomi
- b) Kurangnya capaian indikator sosial
- c) Kurangnya Sumber Daya Manusia
- d) Kurangnya Anggaran
- e) Keterbatasan Data yang akurat dan terkini untuk mengukur indikator dalam IDM

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target IKU adalah dengan mengupayakan koordinasi lintas sektoral dalam meningkatkan status kemajuan suatu desa dan akan melaksanakan FGD dengan stake holder terkait serta melakukan evaluasi dan monitoring berkala terhadap capaian-capaian dalam indikator IDM.

2. Sasaran Eselon III Sekretaris

Hasil Capaian Realisasi Sasaran Pada Sekretariat

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023			Capaian 2023 terhadap targetakhir renstra	Anggaran	Realsiasi	Efiseinsi
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian				
1	Persentase sarana prasarana yang terpenuhi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 6.734.005.111	Rp. 5.829.972.194	12 %
2	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dan terpelihara dengan baik	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 6.734.005.111	Rp. 5.829.972.194	12 %

3	Persentase perencanaan dan kinerja yang tersusundengan baik sesuai ketentuan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	Rp. 6.734.005.111	Rp. 5.829.972.194	12 %
4	Persentase laporan keuangan dan kinerja keuangan SKPD sesuai ketentuan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	Rp. 5.203.749.694	Rp. 4.372.555.348	14 %
5	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	75 (BB)	75 (BB)	72,2 (BB)	75 (BB)	75,50 (BB)	100,66 %	100 ,66 %	-	-	-
	Rata-rata Capaian						100,66 %	100 ,66 %			

a). Perbandingan Realisasi dengan Target

Pada tahun 2023 capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Sekretaris yang di capai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk persentase semua indikator yang bersangkutan mencapai 100%.

b). Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Realisasi kinerja tahun 2023 yang dicapai dengan perbandingan tahun 2022 ada perbedaan. Karena untuk realisasi nilai SAKIP ada kenaikan yang semula pada tahun 2022 mendapatkan nilai 72 dan pada tahun 2023 mendapatkan nilai SAKIP 75

c). Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada tahun 2023 pencapaian yang dicapai Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk persentase sarana prasarana yang terpenuhi

dengan baik, persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dan terpelihara dengan baik, persentase perencanaan dan kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan, persentase laporan keuangan dan kinerja keuangan SKPD sesuai ketentuan dan Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditargetkan memenuhi target yaitu 100% dari yang ditargetkan 100%.

Capaian kinerja SAKIP dan RB pada tahun 2023 mengalami kenaikan nilai di bandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 nilai SAKIP 75, 50

Upaya efisiensi yang dilakukan pada Dinas PMD pada DPA Perubahan telah dilakukan pada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam pelaksanaan penunjang umum terdapat pengurangan/pergeseran anggaran kegiatan.

d). Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Adapun beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja untuk mencapai target yang ditentukan adalah :

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarana Prasarana perkantoran	Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah		493.312.391,-	460.055.179,-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.742.281,-	5.511.500,-

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.410.693,-	116.863.005,-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.218.978,-	4.886.500,-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.131.439,-	6.168.800,-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342.528.000,-	326.625.374,-
2	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		580.738.557,-	543.659.675,-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.056.134,-	22.645.275
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.750.000,-	17.072.000,-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510.932.423,-	503.342.400,-
3	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.545.567,-	7.228.500,-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.003.879,-	3.262.500,-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.541.688,-	3.866.000,-
4	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan & kinerja keuangan SKPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.013.204.564,-	4.233.832.015,-
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	5.006.343.671,-	4.227.845.815,-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	6.860.893-	5.982.200,-
5	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		152.482.150-	142.566.700,-

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	25.000.000,-	24.977.300,-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.482.150,-	117.589.400,-

e) Kendala dan rencana aksi

Pada tahun 2023 untuk bidang kesekretariatan ada kendala yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (kurangnya jumlah ASN) dalam menunjang kegiatan kesekretariatan, sehingga akan berpengaruh dalam menunjang kegiatan pada bidang kesekretariatan. Sehingga perlu adanya penambahan sumber daya manusia.

Rencana aksi yang telah dilakukan dengan mengirim permintaan/penambahan ASN pada Dinas PMD ke BPSDM Kab. Tanah Laut.

f) Analisis Penggunaan SDM nya

Sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah ASN/PTT yang ada di Bagian Sekretariatan berjumlah 13 orang (7 orang ASN dan 6 orang PTT) yang terdiri dari :

- 2 orang Kasubbag;
- 5 orang Pelaksana; dan
- 6 orang PTT

3. Sasaran Eselon III Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat

Hasil Capaian Realisasi Sasaran Pada Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023			Capaian 2023 terhadap target akhir renstra	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
			2021	2022	Target	Realisasi	Capaian				
1	Meningkatnya ekonomi desa	Persentase usaha ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 9.037.879.093	Rp. 8.235.194.311	8 %
2	Meningkatnya pelayanan posyanteK dalam pemanfaatan SDA	Persentase posyanteK yang terbentuk dan aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp.910.991.611	Rp. 797.078.749	13 %
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Persentase terselenggara kegiatan partisipasi masyarakat	34%	96%	100%	0%	0%	0%			
Rata-rata Capaian							100%				
								Tidak ada kegiatan dan anggaran			

A. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata – rata Capaian Kinerja Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat telah terealisasi 100%. Dari 3 indikator kinerja, indikator Persentase usaha ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk pada tahun 2022 114 Bumdesa dan aktif dan Persentase pemetaan dan pendataan usaha ekonomi didesa telah tercapai 100% dari target 100%, indikator Persentase posyantek yang terbentuk dan aktif telah tercapai 100% dari target 100%, indikator Persentase terselenggaranya kegiatan partisipasi masyarakat telah tercapai 100% dari target 100% (target manunggal tuntung pandang 29 desa sedangkan realisasi 29 desa), indikator Persentase PKK aktif telah tercapai 100% dari target 100%. Untuk 2 indikator yaitu Persentase LPM berprestasi dan Persentase pemeliharaan sarana pasca program pemberdayaan masyarakat tidak terealisasi karena memang tidak ada kegiatan dan tidak dianggarkan pada tahun 2022.

$$\frac{\text{Jumlah Bumdesa yang di bina}}{\text{Jumlah Bumdesa yang terbentuk}} \times 100$$

$$\frac{114}{114} \times 100 = 100 \%$$

$$114 \times 100 = 100 \%$$

$$\frac{114}{114}$$

Perbandingan target tahun 2023 dengan tahun 2022 yang terdiri dari 3 indikator Persentase Kelompok Usaha Ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif telah tercapai 100% pada tahun 2023 dan juga tahun 2022 sebelumnya. Pada indikator Persentase Posyantek yang terbentuk dan aktif telah tercapai 100% pada tahun 2023 dan juga tahun 2022 sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2023 ada penambahan 3 indikator lagi yaitu indikator Persentase LPM berprestasi, indikator Persentase PKK aktif dan indikator Persentase pemeliharaan sarana pasca program pemberdayaan.

a) Analisis Peningkatan / Penurunan Kinerja

- Persentase Kelompok Usaha Ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif. Persentase Kelompok Usaha Ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 ditargetkan mencapai angka 100%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan Persentase Kelompok Usaha Ekonomi (BUMDesa) yang terbentuk dan aktif berupa pelatihan –pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola Bumdesa dalam mengelola Bumdesa sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku serta melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pembentukan BUMDesa. Pada tahun 2023 juga melaksanakan pemetaan usaha ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk membuat pemetaan usaha-usaha masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Persentase Posyantek yang terbentuk dan aktif.

Persentase Posyantek yang terbentuk dan aktif yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2023 ditargetkan mencapai angka 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 berupa bimtek anggota posyantek, fasilitasi pembentukan posyantek, mengadakan lomba posyantek serta melaksanakan kaji tiru keluar daerah dalam provinsi dalam rangka meningkatkan pengetahuan para pengurus posyantek tentang posyantek.

Pencapaian atas semua target indikator ini tercapai atas kerja keras dan kerjasama seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanah Laut khususnya pada Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam rangka menambah anggaran pada DPA Perubahan dilakukan pada beberapa sub kegiatan yang sebelumnya terjadi kekurangan anggaran dalam menunjang pelaksanaan dilapangan.

b) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya ekonomi desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.713.087.002	2.205.424.692
				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	48.756.730	36.422.300
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	99.666.465	99.417.654
				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	72.519.357	64.091.000
				Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1.022.472.580	1.015.803.000
				Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa	5.081.376.959	4.814.035.665
2	Meningkatnya pelayanan posyantek dalam pemanfaatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	58.079.796	56.712.500

	sumber daya alam	Hukum Adat	Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	51.153.601	27.516.000
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	49.999.909	36.528.981
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	62.217.310	49.785.000
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	689.540.995	673.786.268

e). Analisis kendala dan rencana aksi

Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam pembentukan sebuah BUMDesa antara lain :

- Kurangnya pemahaman aparat desa terhadap pembentukan sebuah BUMDesa;
- Kurangnya sumber daya manusia yang andal dalam melaksanakan pengelolaan sebuah Bumdesa;
- Seringnya bergantinya kepengurusan Bumdesa; dan

- Kurangnya kemampuan seseorang dalam memimpin Bumdesa.

Rencana aksi yang dilakukan oleh Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat kedepannya adalah dengan terus menerus melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan pembinaan secara berjenjang agar tujuan pembentukan, pembinaan terhadap Bumdesa tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

f) Analisis penggunaan sumber daya manusia.

Dalam menunjang kegiatan yang ada pada Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Kabid
2. 3 (tiga) orang Sub Koordinator
3. 3 (tiga) orang Pelaksana
4. 4 (empat) orang PTT

Badan Usaha Milik Desa yang terbentuk

NO	KEC/ DESA	NAMA BUMDES	Tanggal Pendirian	Jenis Usaha	Status
1	KEC. PELAIHARI				
1	Ambungan	Kayangan Makmur	06 Juli 2015	Fotocopy & Laminating	Tidak
2	Tampang	Amanah	10 Juni 2013	Penggemukan Sapi, Pengelolaan gedung olahraga	Aktif
3	Telaga	Sejahtera Bersama	xx xxxx 2018	Penggemukan sapi, SPP	Aktif
4	Bumi Jaya	Karya jaya	13 Januari 2016	Jasa, Pengelolaan Pasar Desa, SP, Perdagangan, pengelolaan obyek wisata	Aktif
5	Panjaratan	Makmur Bersama	26 Juni 2019	Pariwisata, Saprodi, penyewaan Tenda, Foto copy, ATK, Jual beli Gabah, Pengelolaan air bersih	Tidak
6	Kampung Baru	Karya Bersama	12 Oktober 2017	Pengadaan pupuk, Pangkalan gas, SP, Bulog	Aktif
7	Panggung Baru	Gawi Manuntung	01 Juli 2019	Penggemukan Sapi, penyewaan Organ, Saprodi, SP	Tidak
8	Sungai Riam	Riam Jaya Abadi	01 Juli 2019	Jasa	Aktif
9	Ujung Batu	Jaya Makmur Keramaian	01 Juli 2019	Jasa	Aktif

10	Sumber Mulia	Sumber Rezeki	01 Juli 2020	Fotocopyan	Aktif
11	Tungkaran	Tungkaran Mandiri	14 Juli 2020	Jasa	Aktif

2	KEC. BAJUIN				
1	Tirta Jaya	Bina Bersama	24 Mei 2016	Kompos, material, sembako	Tidak
2	Ketapang	Tunas Karya	25 Oktober 2016	sembako, material	Tidak
3	Tebing Siring	Mugi Rahayu	18 Desember 2017	Jasa, Kerjasama pihak ke 3	Aktif
4	Sei Bakar	Gawi Bersama	24 Juni 2019	Pengelolaan Gedung Olahraga, Penyewaan Sound system, Madu Kalulut, Penjualan Saprodi, Material	Aktif
5	Galam	Mandiri Bersama	3 Juli 2019	Jasa Pembayaran listrik, Madu Kalulut, Pengadaan Material, Peternakan Unggas petelur, Pengelolaan air bersih, Pengelolan wisata	Tidak
6	Pemalongan	Fajar Sejahtera	27 Agustus 2019	Pengelolaan Gedung olahraga, Toko ATK	Aktif
7	Tanjung	Tanjung Raya Perkasa	27 Agustus 2019	Toko Bangunan	Aktif
8	Kunyit	Kunyit Berusaha Selalu	04 Agustus 2020	Pengemukan Sapi	Aktif
9	Bajuin	Kayuh Baimbai	28 September 2020	Toko Bangunan	Aktif
3	KEC. BATU AMPAR				
1	Damit	Bina Sejahtera	06 Juli 2015	Penggemukan sapi dan SP	Aktif
2	Batu Ampar	Batu Ampar	Tahun 2011	Perguliran Dana	Aktif
3	Durian Bungkok	Durian Bungkok	01 Juni 2016	Unit Pasar	Aktif
4	Gunung Mas	Gunung Mas	10 Maret 2018	Penjualan Sembako	Aktif
5	Pantai Linuh	Maju Jaya	29 Oktober 2018	Pengelolaan air bersih, Pengadaan Material	Tidak
6	Tajau Mulya	Tajau Mulya Makmur	01 Juli 2018	Bidang Produksi dan Perdagangan	Tidak
7	Damar Lima	Tunas Abadi	14 Mei 2018	Penggemukan Sapi, Pengelolaan Air Bersih	Tidak
8	Jilatan	Berkat Maju Bersama	xx xxxx 2018	Jasa PPOB	Aktif
9	Gunung Melati	Mekar Sedayu	xx xxxx 2019	Jual Sembako	Aktif
10	Jilatan Alur	Makmur Jaya	xx xxxx 2019	Jasa	Aktif

11	Bluru	Berkah Jaya Mandiri	xx xxxx 2019	Jasa	Aktif
----	-------	---------------------------	--------------	------	-------

4	KEC. JORONG				
1	Simpang 4 Sungai Baru	Karya Putra Pribumi	16 Mei 2017	Jasa Angkutan, Perkebunan, Peternakan	Tidak
2	Asam Jaya	Bina Bakti Sejahtera	11 Juni 2014	pengelola pasar, pamsimas	Tidak
3	Alur	Harapan Sejahtera	29 Oktober 2014	Air Bersih	Aktif
4	Karang Rejo	Sejahtera	15 September 2016	penggemukan sapi dan jasa	Aktif
5	Swarangan	Marlin Jaya Mandiri	November 2018	Jual Beli BBM, Pengelolaan Pasar, Pengadaan Tenaga Kerja	Aktif
6	Asam-asam	Maju Jaya Bersama	01 Desember 2018	Jasa, Perikanan	Tidak
7	Jorong	Berkah Ibu	24 April 2019	Tambak Ikan, Saprod, Jual beli sawit, Kerjasama pihak ke 3, Pelelangan Ikan	Aktif
8	Sabuhur	Berkat Bersama	8 Tahun 2018	Peternakan	Tidak
5	KEC. KINTAP				
1	Pandan Sari	Mitra Rumpun Pandansari	12 Nopember 2015	Pasar Desa, Wisata Desa, Jasa	Aktif
2	Kintap	Al-Mu'awanah	02 September 2015	Jasa angkutan, penggemukan ternak, simpan pinjam	Tidak
3	Kintapura	Amanah	19 Oktober 2015	Foto copy dan ATK	Tidak
4	Sungai Cuka	Srindat Jaya	20 Oktober 2015	Jasa, Pertanian, Peternakan, IRT	Tidak
5	Riam Adungan	Riam Jaya	13 Oktober 2015	Jasa, perdagangan, perkebunan, industri	Tidak
6	Muara Kintap	Muara Maju Bersama	22 Juni 2015	IRT, Perikanan, Perkebunan, Peternakan, pasar desa, SP, Pengadaan barang Jasa	Tidak
7	Salaman	Salaman Membangun	05 Mei 2015	Jasa Angkutan dan perkebunan	Tidak
8	Kintap Kecil	Riam Jaya	25 September 2015	Tani, Kebun, Ternak, Jasa IRT	Tidak
9	Pasir Putih	Barkat Manuntung	03 September 2015	Perkebunan, pertanian, material, SP, Peternakan, Jasa	Tidak

10	Sumber Jaya	Usaha Bersama	28 September 2015	Perikanan, IRT, Jasa, Peternakan	Aktif
11	Bukit Mulia	Berkah Mulia	30 September 2015	Pertanian, perkebunan, perdagangan, Jasa, Pertambangan	Tidak
12	Kebun Raya	Maju Bersama	30 September 2015	Perkebunan, IRT, Jasa	Tidak
13	Mekar Sari	Maju Bersama	28 September 2015	Jasa, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, IRT, SPP	Tidak
14	Sebamban Baru	Bumdes Maju Bersama	19 Oktober 2015	Industri Rumah Tangga	Tidak
6	KEC. TAKISUNG				
1	Benua Tengah	Maju Bersama	01 Juli 2018	Saprotan, Pengelolaan Sampah	Tidak
2	Sumber Makmur	Maju Jaya	14 Desember 2017	Perdagangan, Jasa	Tidak
3	Pagatan Besar	Bina Maju Lestari	10 Agustus 2018	Ekowisata Hutan Mangrove	Aktif
4	Kuala Tambangan	Batu Lima Tambangan	22 Oktober 2018	Jasa, Perdagangan	Tidak
5	Ranggang	Karya Bersama	10 Nov 2018	Pengelolaan Portal, Pembuatan Harang	Tidak
6	Batilai	Jaya Bersama	28 Nopember 2018	Persewaan Peralatan Pesta, Pengelolaan Wisata	Tidak
7	Telaga Langsung	Berkat Sepakat	04 Desember 2018	Jasa, Perdagangan	Tidak
8	Gunung Makmur	Maju Bersama	17 Desember 2018	Jasa, Perdagangan	Tidak
9	Takisung	Karya Bhakti Bersama	05 Desember 2018	Pengelolaan Wisata Pantai	Tidak
10	Benua Lawas	Bangun Banua	05 Desember 2019	Jasa	
11	Ranggang Dalam	Berkat Bakula	05 Desember 2019	Arang	Aktif
12	Tabanio	Usaha Bersama	05 Desember 2019	Jasa	Aktif
7	KEC. PANYIPATAN				
1	Tanjung Dewa	Tanjung Bersama	01 Desember 2014	Industri RT, Simpan pinjam	Tidak

2	Batakan	Bangun Banua	28 Nopember 2014	Konstruksi, Industri RT), SPP, Wisata, Pertanian, perkebunan,perikanan	Tidak
---	---------	-----------------	---------------------	--	-------

3	Kandangan Baru	Munggu Jaya	02 April 2016	ATK, Saprotan	Tidak
4	Sukaramah	Karya Mandiri	02 April 2019	Jasa	Aktif
5	Kuringkit	Rakat Mufakat	06 Juli 2020	Jasa	Aktif
6	Panyipatan	Panyipatan Jaya	13 Juli 2020	Jasa	Aktif
7	Kandangan Lama	Kandangan Lama Sejahtera	14 Juli 2020	Jasa	Aktif
8	KEC. TAMBANGULANG				
1	Martadah Baru	Tri Tunggal Mandiri	30 Januari 2018	Jasa, Pasar Desa, Objek wisata, Bank Sampah, Perdagangan	Aktif
2	Pulau Sari	Rakat Mufakat	27 Desember 2018	Jasa, Pasar Desa, Bank Sampah	Aktif
3	Martadah	Tarini Jaya	11 Maret 2019	Bank Sampah, Pengelolaan Air Bersih, Pengelolaan Portal	Tidak
4	Gunung Raja	Sinar Jaya	08 April 2019	Cafetaria, Kios Desa, Bank Sampah, Kerjasama Pihak ke 3	Tidak
5	Bingkulu	Bingkulu Sejahtera	05 Juli 2019	Jual Saprodi, Jasa PPOB, Penggemukan sapi, ATK dan Foto copy	Tidak
6	Sungai Jelai	Sungai Jelai Sejahtera	05 Agustus 2020	Sewa Tenda	Aktif
7	Sungai Pinang	Sungai Pinang Jaya Abadi	23 Oktober 2020	Sewa Tenda	Aktif
9	KEC. BATI-BATI				
1	Ujung	Ujung	01 Maret 2018	Usaha Batako	Tidak
2	Banyu Irang	Maju Bersama	01 Maret 2018	Jasa, Perdagangan, Perkebunan	Aktif
3	Banua Raya	Benua Raya Mufakat	18 Desember 2015	Pertanian, SP	Tidak
4	Nusa Indah	Anugerah Jaya	18 Maret 2016	Jasa, Waserda, Saprotan, SP	Tidak

5	Ujung Baru	Gawi Sabumi	09 Desember 2016	Pertanian, Jasa, SP, Sewa Tenda	Aktif
---	------------	-------------	---------------------	------------------------------------	-------

6	Pandahan	Boga Jaya	11 Januari 2017	Pasar Desa, Desa Wisata	Aktif
7	Bentok Darat	Bentok Darat sejahtera	28 Juli 2018	Jasa penyewaan Tenda, Pertanian	Aktif
8	Sambangan	Gawi Manuntung	14 September 2018	Perdagangan, Jasa	Tidak
9	Padang	Padang Berkah Makmur	23 September 2019	Sewa Tenda	Tidak
10	Bentok Kampung	Mandiri Sejahtera	23 September 2019	Sewa Tenda	Aktif
11	Liang Anggang	Berkah Karya Abadi	23 Juni 2020	Sewa Tenda	Aktif
12	Kait-Kait	Maju Bersama	21 September 2020	Jasa	Aktif
10	KEC. KURAU				
1	Bawah Layung	Amanah	23 September 2019	Jasa	Aktif
2	Tambak Karya	Karya Bersama	18 Agustus 2020	Jasa	Aktif
3	Tambak Sarinah	Jaya Sejahtera	23 September 2020	Jasa	Aktif
4	Sarikandi	Sarikandi Maju	27 Agustus 2020	Jasa	Aktif
11	KEC. BUMI MAKMUR				
1	Bumi Harapan	Jaya Sejahtera	23 Maret 2017	Jasa, perdagangan	Tidak
2	Sungai Rasau	Anugerah	19 Juli 2017	Waserda, Pertanian, Perikanan	Aktif
3	Handil Gayam	Berkat Usaha	16 Maret 2018	Jasa, Saprotan	Aktif
4	Handil Birayang Atas	Ruhui Rahayu	01 April 2018	Jasa dan Sarana Produksi	Aktif
5	Handil Birayang Bawah	Sumber Makmur	24 Mei 2018	Jasa dan Saprodi	Tidak
	Total Bumdesa 124				

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Keuangan BUMDesa di Balai PPMDDT & TB di Banjarmasin pada tanggal 10 s/d 13 Oktober 2023



**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
Expo/Pameran BUMDesa se-Kalsel di Banjarbaru**

Silakan Kunjungi Stand Bumdesa Tanah Laut pada Bumdesa Expo 2023 se Kalsel di Lapangan Murjani Banjarbaru. Tanggal 13 sd 17 Oktober 2023.

Tersedia Produk dan Olahan, Kain dan Kaos Sasirangan, Krupuk Ikan, Amplang, Sirup Mangrove, Madu Lebah dan Madu Kelulut, Kopiah Kandang, Iwak Karing Tenggiri, Minuman Lahang, Jahe Kunyit Instan, Bakul Anyaman Tali Plastik, dan lainnya.

Pembukaan Expo Jumat, 13 Oktober 2023



Pembukaan Bumdesa Expo 2023 se Kalsel, dan
Kunjungan Sekda Prop Kalsel dan Kadis PMD Prop
Kalsel ke Stand Bumdesa Tanah Laut.
Tanggal 13 sd 17 Oktober 2023.

"Dari Desa untuk Kalsel Maju"

Jumat, 13 Oktober 2023.



**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
Penilaian BUMDesa Terbaik Tingkat Kabupaten Tanah Laut**



**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Keg. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
Peningkatan Kapasitas BUMDesa oleh Dinas PMD Kab. Tanah Laut**

**Pembinaan Bumdes pada Giat Manunggal
Tuntung Pandang di Desa Tampang Kec.
Pelaihari.**

Rabu, 5 Juli 2023.



Selain kegiatan Bumdesa juga ada kegiatan TTG. Munculnya Pemberdayaan masyarakat dikarenakan adanya suatu kondisi sosial, ekonomi, teknologi masyarakat yang masih kurang dan mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak

tahu dalam berbagai hal. Salah satu faktor penting dalam mencapai mutu kehidupan didalam proses pemberdayaan dan pembangunan kapasitas masyarakat yakni faktor teknologi. Teknologi merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Adanya teknologi mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi merupakan salah satu pilihan yang tepat dan berguna sehingga dapat mendukung masyarakat untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri dan salah satunya adalah melalui penerapan Teknologi Tepat Guna.

Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang sesuai dengan kondisi dimana teknologi tersebut digunakan atau diterapkan, baik 3 dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya, sehingga masyarakat setempat mudah berpartisipasi dan bisa memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Teknologi Tepat Guna (TTG) dapat difungsikan dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan potensi lokal. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) secara optimal oleh masyarakat akan mampu mewujudkan usaha masyarakat yang dapat mengefisienkan ongkos produksi, memperbaiki proses mutu produksi, meningkatkan kapasitas, dan nilai tambah produk, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan dapat memberantas kemiskinan.

Pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) merupakan salah satu program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Program TTG merupakan program strategis untuk mensejahterakan masyarakat karena dapat menambah lapangan kerja, menambah produktivitas masyarakat, dan bertambahnya inventorisasi baru.

Posyantek bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan TTG di masyarakat dimana seharusnya bisa memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai TTG dengan menciptakan inovasi produk TTG, selain itu Posyantek sebagai sarana informasi dan pengembangan sarana prasarana alat TTG di masyarakat.

Hal ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dalam pelaksanaan program TTG dan akan membentuk lembaga pelayanan TTG di setiap Kecamatan dan Desa yang tersebar

di Kabupaten Tanah Laut. Dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2018

tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

**Melaksanakan Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)
Kecamatan di Kecamatan Takisung, Bumi Makmur, Jorong, Panyipatan, Batu
Ampar dan Kintap**





**Rapat Koordinasi Persiapan Lomba Kreasi Dan Inovasi Teknologi Tepat Guna
(TTG) pada hari Kamis , 15 Juni 2023 di Kolam Renang Mina Tirta
Desa Atu-Atu Kec. Pelaihari**



**Melaksanakan Lomba Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)
Tingkat Kabupaten Tahun 2023**





Selain Bumdesa dan TTG pada bidang Pemberdayaan Masyarakat juga terdapat penunjang kegiatan PKK. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa dalam rangka mencapai tujuan Bersama yakni mensejahterakan rakyat, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut, tidak akan mampu kalau hanya dilaksanakan oleh Pemerintah saja tanpa bantuan dan partisipasi masyarakat, oleh karena itu dengan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang mempunyai kader sampai ke akar rumpun di tingkat RT dan Dasa Wisma sangat membantu dalam mewujudkan cita-cita Bangsa yakni Mensejahterakan Rakyat. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK merupakan gerakan yang tumbuh secara Nasional Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan Pembangunan masyarakat bermula dari seminar Home Economic di Bogor pada tahun 1957.

Dalam perkembangan dan keberadaannya sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat yang ada baik diperkantoran maupun di pedesaan, berdasarkan kepada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 53 Tahun 2000 dan dijabarkan bahwa PKK tidak didominasi oleh kaum perempuan saja, namun kaum pria pun turut berkiprah didalamnya.

Bahwa PKK dapat melihat dan merasakan selain untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, juga bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas memahami fungsi dan tujuannya, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna di masyarakat melalui berbagai aspek.

DATA PKK AKTIF SE-KABUPATEN

TANAH LAUT TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN	NAMA PKK	KETERANGAN
1	Kabupaten Tanah Laut	TP. PKK Kabupaten Tanah Laut	AKTIF

2	Kecamatan Takisung	TP. PKK Kecamatan Takisung	AKTIF
3	Benua Lawas	TP. PKK Desa Benua Lawas	AKTIF
4	Tabonio	TP. PKK Desa Tabonio	AKTIF
5	Kuala Tambangan	TP. PKK Desa Kuala Tambangan	AKTIF
6	Takisung	TP. PKK Desa Takisung	AKTIF
7	Gunung Makmur	TP. PKK Desa Gunung Makmur	AKTIF
8	Benua Tengah	TP. PKK Desa Benua Tengah	AKTIF
9	Ranggang	TP. PKK Desa Ranggang	AKTIF
10	Pagatan Besar	TP. PKK Desa Pagatan Besar	AKTIF
11	Batilai	TP. PKK Desa Batilai	AKTIF
12	Ranggang Dalam	TP. PKK Desa Ranggang Dalam	AKTIF
13	Telaga Langsung	TP. PKK Desa Telaga Langsung	AKTIF
14	Sumber Makmur	TP. PKK Desa Sumber Makmur	AKTIF
15	Kecamatan Jorong	TP. PKK Kecamatan Jorong	AKTIF
16	Sabuhur	TP. PKK Desa Sabuhur	AKTIF
17	Jorong	TP. PKK Desa Jorong	AKTIF
18	Asam-Asam	TP. PKK Desa Asam-Asam	AKTIF
19	Batalang	TP. PKK Desa Batalang	AKTIF
20	Swarangan	TP. PKK Desa Swarangan	AKTIF
21	Muara Asam-Asam	TP. PKK Desa Muara Asam-Asam	AKTIF
22	Alur	TP. PKK Desa Alur	AKTIF
23	Asri Mulia	TP. PKK Desa Asri Mulia	AKTIF
24	Karang Rejo	TP. PKK Desa Karang Rejo	AKTIF
25	Asam Jaya	TP. PKK Desa Asam Jaya	AKTIF
26	Simpang Empat Sei Baru	TP. PKK Desa Simpang Empat Sei Baru	AKTIF
27	Kecamatan Pelaihari	TP. PKK Kecamatan Pelaihari	AKTIF
28	Kelurahan Angsau	TP. PKK Kelurahan Angsau	AKTIF

29	Kelurahan Saranag Halang	TP. PKK Kelurahan Saranag Halang	AKTIF
----	-----------------------------	-------------------------------------	-------

30	Kelurahan Pelaihari	TP. PKK Kelurahan Pelaihari	AKTIF
31	Kelurahan Pabahanan	TP. PKK Kelurahan Pabahanan	AKTIF
32	Kelurahan Karang Taruna	TP. PKK Kelurahan Karang Taruna	AKTIF
33	Bumi Jaya	TP. PKK Desa Bumi Jaya	AKTIF
34	Sei Riam	TP. PKK Desa Sei Riam	AKTIF
35	Tampang	TP. PKK Desa Tampang	AKTIF
36	Telaga	TP. PKK Desa Telaga	AKTIF
37	Panjaratan	TP. PKK Desa Panjaratan	AKTIF
38	Atu-atu	TP. PKK Desa Atu-atu	AKTIF
39	Panggung	TP. PKK Desa Panggung	AKTIF
40	Tungkaran	TP. PKK Desa Tungkaran	AKTIF
41	Ujung Batu	TP. PKK Desa Ujung Batu	AKTIF
42	Panggung Baru	TP. PKK Desa Panggung Baru	AKTIF
43	Ambungan	TP. PKK Desa Ambungan	AKTIF
44	Guntung Besar	TP. PKK Desa Guntung Besar	AKTIF
45	Kampung Baru	TP. PKK Desa Kampung Baru	AKTIF
46	Sumber Mulia	TP. PKK Desa Sumber Mulia	AKTIF
47	Pemuda	TP. PKK Desa Pemuda	AKTIF
48	Kecamatan Kurau	TP. PKK Kecamatan Kurau	AKTIF
49	Sungai Bakau	TP. PKK Sungai Bakau	AKTIF
50	Maluka Baulin	TP. PKK Maluka Baulin	AKTIF
51	Bawah Layung	TP. PKK Bawah Layung	AKTIF
52	Tambak Sarinah	TP. PKK Tambak Sarinah	AKTIF
53	Kali Besar	TP. PKK Desa Kali Besar	AKTIF
54	Handil Negara	TP. PKK Desa Handil Negara	AKTIF
55	Padang Luas	TP. PKK Desa Padang Luas	AKTIF
56	Kurau	TP. PKK Desa Kurau	AKTIF
57	Tambak Karya	TP. PKK Desa Tambak Karya	AKTIF

58	Raden	TP. PKK Desa Raden	AKTIF
----	-------	--------------------	-------

59	Sarikandi	TP. PKK Desa Sarikandi	AKTIF
60	Kecamatan Bati-Bati	TP. PKK Kecamatan Bati-Bati	AKTIF
61	Benua Raya	TP. PKK Desa Benua Raya	AKTIF
62	Bati-Bati	TP. PKK Desa Bati-Bati	AKTIF
63	Ujung	TP. PKK Desa Ujung	AKTIF
64	Liang Anggang	TP. PKK Desa Liang Anggang	AKTIF
65	Bentok Kampung	TP. PKK Desa Bentok Kampung	AKTIF
66	Bentok Darat	TP. PKK Desa Bentok Darat	AKTIF
67	Banyu Irang	TP. PKK Desa Banyu Irang	AKTIF
68	Nusa Indah	TP. PKK Desa Nusa Indah	AKTIF
69	Pandahan	TP. PKK Desa Pandahan	AKTIF
70	Padang	TP. PKK Desa Padang	AKTIF
71	Ujung Baru	TP. PKK Desa Ujung Baru	AKTIF
72	Sambangan	TP. PKK Desa Sambangan	AKTIF
73	Kait-Kait	TP. PKK Desa Kait-Kait	AKTIF
74	Kait-kait Baru	TP. PKK Desa Kait-kait Baru	AKTIF
75	Kecamatan Panyipatan	TP. PKK Kecamatan Panyipatan	AKTIF
76	Batu Tungku	TP. PKK Desa Batu Tungku	AKTIF
77	Panyipatan	TP. PKK Desa Panyipatan	AKTIF
78	Kandangan Baru	TP. PKK Desa Kandangan Baru	AKTIF
79	Kandangan Lama	TP. PKK Desa Kandangan Lama	AKTIF
80	Batakan	TP. PKK Desa Batakan	AKTIF
81	Kuringkit	TP. PKK Desa Kuringkit	AKTIF
82	Tanjung Dewa	TP. PKK Desa Tanjung Dewa	AKTIF
83	Suka Ramah	TP. PKK Desa Suka Ramah	AKTIF
84	Batu Mulya	TP. PKK Desa Batu Mulya	AKTIF
85	Bumi Asih	TP. PKK Desa Bumi Asih	AKTIF
86	Kecamatan Kintap	TP. PKK Kecamatan Kintap	AKTIF

87	Pandan Sari	TP. PKK Desa Pandan Sari	AKTIF
----	-------------	--------------------------	-------

88	Kintap	TP. PKK Desa Kintap	AKTIF
89	Kintapura	TP. PKK Desa Kintapura	AKTIF
90	Sei Cuka	TP. PKK Desa Sei Cuka	AKTIF
91	Riam Adungan	TP. PKK Desa Riam Adungan	AKTIF
92	Muara Kintap	TP. PKK Desa Muara Kintap	AKTIF
93	Salaman	TP. PKK Desa Salaman	AKTIF
94	Kintap Kecil	TP. PKK Desa Kintap Kecil	AKTIF
95	Pasir Putih	TP. PKK Desa Pasir Putih	AKTIF
96	Sumber Jaya	TP. PKK Desa Sumber Jaya	AKTIF
97	Bukit Mulia	TP. PKK Desa Bukit Mulia	AKTIF
98	Kebun Raya	TP. PKK Desa Kebun Raya	AKTIF
99	Mekar Sari	TP. PKK Desa Mekar Sari	AKTIF
100	Sebamban Baru	TP. PKK Desa Sebamban Baru	AKTIF
101	Kecamatan Tambang Ulang	TP. PKK Desa Kecamatan Tambang Ulang	AKTIF
102	Bingkulu	TP. PKK Desa Bingkulu	AKTIF
103	Gunung Raja	TP. PKK Desa Gunung Raja	AKTIF
104	Kayu Abang	TP. PKK Desa Kayu Abang	AKTIF
105	Martadah	TP. PKK Desa Martadah	AKTIF
106	Martadah Baru	TP. PKK Desa Martadah Baru	AKTIF
107	Pulau Sari	TP. PKK Desa Pulau Sari	AKTIF
108	Sungai Jelai	TP. PKK Desa Sungai Jelai	AKTIF
109	Sungai Pinang	TP. PKK Desa Sungai Pinang	AKTIF
110	Tambang Ulang	TP. PKK Desa Tambang Ulang	AKTIF
111	Kecamatan Batu Ampar	TP. PKK Kecamatan Batu Ampar	AKTIF
112	Batu Ampar	TP. PKK Desa Batu Ampar	AKTIF
113	Gunung Mas	TP. PKK Desa Gunung Mas	AKTIF
114	Tajau Mulia	TP. PKK Desa Tajau Mulia	AKTIF
115	Jilatan	TP. PKK Desa Jilatan	AKTIF

116	Durian Bungkok	TP. PKK Desa Durian Bungkok	AKTIF
-----	----------------	-----------------------------	-------

117	Ambawang	TP. PKK Desa Ambawang	AKTIF
118	Damit	TP. PKK Desa Damit	AKTIF
119	Gunung Melati	TP. PKK Desa Gunung Melati	AKTIF
120	Bluru	TP. PKK Desa Bluru	AKTIF
121	Pantai Linuh	TP. PKK Desa Pantai Linuh	AKTIF
122	Damit Hulu	TP. PKK Desa Damit Hulu	AKTIF
123	Jilatan Alur	TP. PKK Desa Jilatan Alur	AKTIF
124	Damar Lima	TP. PKK Desa Damar Lima	AKTIF
125	Tajau Pecah	TP. PKK Desa Tajau Pecah	AKTIF
126	Kecamatan Bajuin	TP. PKK Kecamatan Bajuin	AKTIF
127	Tirta Jaya	TP. PKK Desa Tirta Jaya	AKTIF
128	Galam	TP. PKK Desa Galam	AKTIF
129	Pemalongan	TP. PKK Desa Pemalongan	AKTIF
130	Sungai Bakar	TP. PKK Desa Sungai Bakar	AKTIF
131	Tanjung	TP. PKK Desa Tanjung	AKTIF
132	Bajuin	TP. PKK Desa Bajuin	AKTIF
133	Ketapang	TP. PKK Desa Ketapang	AKTIF
134	Kunyt	TP. PKK Desa Kunyt	AKTIF
135	Tebing Siring	TP. PKK Desa Tebing Siring	AKTIF
136	Kecamatan Bumi Makmur	TP. PKK Kecamatan Bumi Makmur	AKTIF
137	Bumi Harapan	TP. PKK Desa Bumi Harapan	AKTIF
138	Kurau Utara	TP. PKK Desa Kurau Utara	AKTIF
139	Sungai Rasau	TP. PKK Desa Sungai Rasau	AKTIF
140	Pantai Harapan	TP. PKK Desa Pantai Harapan	AKTIF
141	Handil Birayang Atas	TP. PKK Desa Handil Birayang Atas	AKTIF
142	Handil Labuan Amas	TP. PKK Desa Handil Labuan Amas	AKTIF
143	Handil Suruk	TP. PKK Desa Handil Suruk	AKTIF

144	Handil Birayang Bawah	TP. PKK Desa Handil Birayang Bawah	AKTIF
-----	-----------------------	------------------------------------	-------

145	Handil Babirik	TP. PKK Desa Handil Babirik	AKTIF
146	Handil Gayam	TP. PKK Desa Handil Gayam	AKTIF
147	Handil Maluka	TP. PKK Desa Handil Maluka	AKTIF
TOTAL PKK = 147			

**JAMBORE KADER PKK TAHUN 2023 DI RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PELAIHARI,
(28 AGUSTUS 2023)**



**HARI KESATUAN GERAK PKK ke -51
dilaksanakan di Gedung Balairung Tuntung Pandang,
Selasa (13 juni 2023)**



**PENILAIAN LOMBA HATINYA PKK DAN PEMANFAATAN LIMBAH
DESA SUMBER MULYA KECAMATAN PELAIHARI
KAMIS, 02 MARET 2023**



**PENILAIAN LOMBA HATINYA PKK DAN PEMANFAATAN LIMBAH
DESA SUMBER JAYA KECAMATAN KINTAP
SENIN, 06 MARET 2023**



**SOSIALISASI KEPADA KADER PKK UNTUK PENCEGAHAN STUNTING
DI AULA SEKRETARIAT TP PKK KABUPATEN TANAH LAUT, PELAIHARI (30 AGUSTUS 2023)**





4. Sasaran Eselon III Bidang Bina Pemerintahan Desa

Hasil Capaian Realisasi Sasaran Pada Bidang Bina Pemerintahan Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023			Capaian 2023 terhadap target akhir renstra	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
			2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian				
1	Meningkatnya Administrasi Desa	Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 9.037.879.093	Rp. 8.235.194.311	8 %
2	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 723.433.798	Rp. 612.896.400	11 %
3	Cakupan Kinerja Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Persentase Desa yang Dievaluasi Tingkat Perkembangannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 9.037.879.093	Rp. 8.235.194.311	8 %
	Rata-rata Capaian						100%	100%			

a. Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata – rata Capaian Kinerja Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan telah terealisasi 100%. Dari 3 indikator kinerja, indikator Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik, indikator Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaan , indikator Persentase Desa yang Dievaluasi Tingkat Perkembangannya telah tercapai 100% dari target 100%.

Realiasi sasaran pada indikator ini dimaksud untuk meningkatkan pengembangan wawasan pemerintahan desa dengan formuliasi perhitungan dalam indikator kinerja ini adalah :

Jumlah Desa yang dbina x 100 %

Jumlah Desa

$$\frac{130 \times 100}{130} = 100 \%$$

130

a) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan target tahun 2022 dengan tahun 2023 yang terdiri dari indikator Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik tercapai 100% pada

tahun 2023 dan juga tahun 2022 sebelumnya.

b) Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik

Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2023 ditargetkan mencapai angka 100%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan Persentase desa yang pengelolaan administrasinya baik. Pencapaian atas target indikator ini tercapai atas kerja keras dan kerjasama seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya Bidang Bina Pemerintahan Desa. Upaya yang dilakukan dalam mencapai terget persentase desa yang pengelolaan dan administrasi yang baik pada tahun 2023 dengan melaksanakan :

- Pembinaan dengan kelompok sasaran kegiatan 130 desa di Kabupaten Tanah Laut, aparatur pemerintahan desa dan aparatur pemerintahan kecamatan se Kabupaten Tanah Laut serta aparat desa. Kegiatan pembinaan dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal dengan materi Administrasi Produk Hukum di Desa dengan narasumber dari Bagian Hukum Setda Tanah Laut serta Tenaga Ahli Hukum.
- Pembuatan aplikasi data perangkat desa yaitu Aplikasi “SIAP DESA” yang sudah disahkan dengan keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/1107-KUM/2022 tentang Penetapan aplikasi “SIAP DESA” (Sistem Informasi Aparatur Pemerintah Desa) sebagai inovasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.

- Persentase desa yang pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik

Persentase desa yang pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2023 ditargetkan mencapai angka 100%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan Persentase desa yang pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa dua angkatan Pada 11 kecamatan di 130 Desa dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Workshop Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan BPD pada setiap desa.
2. Kegiatan In-House Training pada 11 Kecamatan 130 Desa dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. In-House Training Aplikasi Keuangan Desa Angakatan I (SISKUEDES Versi 2.0.4) Tahun Anggaran 2023 dan Angkatan II (SISKUEDES Versi 2.0.5) untuk Tahun Anggaran 2023 dihadiri oleh 11 Kecamatan 130 Desa Khusus Kaur Keuangan di Desa Masing-masing.
3. Kegiatan Workshop Tim Evaluasi Raperdes tentang APBDesa pada 11 Kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan Workshop dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Raperdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 dihadiri oleh 11 Kecamatan se-Kabupaten Tanah Laut dengan materi pembahasan terkait Peraturan Bupati nomor 118 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

c) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Meningkatnya administrasi desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa	5.081.376.959	4.814.035.665
				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	72.519.357	64.091.000

Program Administrasi Pemerintahan Desa
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Telah dilaksanakan Pemilihan serta Pelantikan 52 Kepala Desa se Kabupaten Tanah Laut.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

Penilaian administrasi ini dibutuhkan sebagai langkah pertama dalam memahami Desa dan Kelurahan yang diunggulkan. Ditahap ini akan dinilai kelengkapan dan kualitas administrasi Desa dan Kelurahan. Penilaian administrasi dilaksanakan pada tanggal 27 April sampai dengan 03 Mei 2023 di 6 (enam) desa peserta lomba yaitu :

1. Desa Bluru Kecamatan Batu Ampar;
2. Desa Kait-Kait Baru Kecamatan Bati-Bati;
3. Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur;
4. Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang;
5. Desa Guntung Besar Kecamatan Pelaihari dan
6. Desa Batu Mulia Kecamatan Panyipatan (sebelum mengundurkan diri).

- d) Analisis penggunaan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Kabid;
2. 3 (tiga) orang Sub Koordinator;
3. 2 (dua) orang pelaksana; dan
4. 3 (tiga) orang PTT

- e) Analisis kendala dan solusinya.

Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan implementasi kegiatan tidak terlepas dari Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di desa.

Permasalahan implementasinya antara lain :

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa dimana munculnya ketergantungan pada 1 (satu) atau 2 (dua) orang perangkat desa yang menguasai IT.

2. Kurangnya pemahaman pentingnya transparansi pengelolaan keuangan

desa bagi aparaturn pemerintahan desa. Sehingga diperlukan peningkatan kapasitas bagi kades, perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa baik BPD, LPM, Karangtaruna dll yang lebih spesifik.

3. Prosedur dan proses penyusunan pertanggungjawaban (Spj) masih dianggap sulit dan rumit oleh aparaturn pemerintahan desa.
4. Tupoksi yang kurang diperhatikan ditataran desa Kades, Sekdes dan Kaur serta Kasi.

Solusi yang akan dilakukan adalah dengan terus menerus melakukan pembinaan berupa pelatihan, bimtek (in House Training), pendampingan dalam rangka penyusunan anggaran APBDes dll kepada aparaturn pemerintahan desa sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya sesuai dengan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat desa dan juga akan melakukan peningkatan kapasitas berupa kunjungan kedesa yang lebih maju

**Foto Kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa Angkatan
I Tahun Anggaran 2023.**







**Foto Kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa
Angkatan II Tahun Anggaran 2023.**



Foto Kegiatan Workshop Tim Evaluasi Raperdes APBDesa Tahun Anggaran 2023



Foto Kegiatan In-House Training Aplikasi Keuangan Desa Tahun
Anggran 2023



5. Sasaran Eselon III Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan

Hasil Capaian Realisasi Sasaran Pada Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2023			Capaian 2023 terhadap target akhir renstra	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
			2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian				
1	Meningkatnya pengembangan kawasan Perdesaan	Persentase pengembangan kawasan perdesaan	100%	40%	40%	40%	100%	100%	Rp. 723.433.798	Rp. 612.896.400	11 %
2	Meningkatnya kualitas data desa	Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa	100%	40%	40%	40%	100%	100%	Rp. 9.037.879.093	Rp. 8.235.194.311	8 %
3	Meningkatnya kemampuan pengurus Lembaga Adat Desa	Persentase lembaga adat desa yang dibina	100%	40%	40%	40%	100%	100%	Rp. 910.991.611	Rp. 797.078.749	13 %
4	Cakupan kinerja evaluasi tingkat perkembangan Desa	Persentase desa yang dievaluasi tingkat perkembangannya	100%	100%			Kegiatan dipindahkan ke Bidang Bina Pemerintahan Desa		Rp. 723.433.798	Rp. 612.896.400	11 %
		Rata-rata Capaian					100%	100%			

a. Perbandingan realisasi dengan Target

Rata – rata Capaian Kinerja Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan telah terealisasi 100%. Dari 3 indikator kinerja, indikator Persentase pengembangan kawasan perdesaan telah tercapai 100% dari target 40%. Indikator Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa telah tercapai 100% dari target 40%. Dan indikator yang terakhir Persentase lembaga adat desa yang dibina juga telah tercapai 100% dari target 40%. Untuk indikator Persentase desa yang dievaluasi tingkat perkembangannya target tidak ada kegiatan dan pada saat pelaksanaan tahun 2023 dipindahkan dan disesuaikan dengan tupoksi pada Bidang Bina Pemerintahan Desa dan

Realiasi sasaran pada indikator ini dimaksud untuk meningkatkan pengembangan wawasan pemerintahan desa dengan formuliasi perhitungan dalam indikator kinerja ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Kawasan Perdesaan} \times 100 \%}{\text{Jumlah Rencana Kawasan}}$$

$$\frac{7 \text{ Kawasan Perdesaan} \times 100 \%}{7 \text{ Kawasan Perdesaan}} = 100 \%$$

Kelurahan.

a) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan target tahun 2022 dengan tahun 2023 yang terdiri dari indikator Persentase pengembangan kawasan perdesaan tercapai 100% pada tahun 2022 dan juga tahun 2022 sebelumnya. Indikator Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa tercapai 100% pada tahun 2023 dan juga tahun 2022 sebelumnya. Dan yang terakhir indikator Persentase lembaga adat desa yang aktif juga tercapai 100% pada tahun 2023 dan juga tahun 2022 sebelumnya.

b) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Indikator Persentase pengembangan kawasan perdesaan.

Indikator Persentase pengembangan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2023 ditargetkan mencapai angka 40%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan Persentase pengembangan kawasan perdesaan adalah :

1. Bimbingan Teknis Kelembagaan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa)

Bimbingan Teknis Kelembagaan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dengan target 7 (tujuh) kecamatan. Peserta masing-masing terdiri dari 3 orang pengurus BKAD. Bimbingan teknis BKAD bertujuan agar pengurus BKAD dapat lebih optimal dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan di desa berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing pengurus BKAD. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis BKAD bertempat di Hotel Sinar Pelaihari dan dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Laut yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut mengatakan pentingnya BKAD bagi kemajuan suatu pemerintahan desa dalam rangka ikut membangun desanya dan lebih pentingnya adalah BKAD dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di desa.

- Indikator Persentase Profil Desa

Indikator Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa yang

dilaksanakan oleh Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 ditargetkan mencapai angka 40%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan Persentase profil desa sebagai dasar klasifikasi status desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, maka pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut menyusun pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan sebagai payung hukum bagi daerah dan desa/kelurahan. Sistem informasi profil desa dan kelurahan (PRODESkel) diadakan untuk dapat melihat gambaran secara menyeluruh dan sekaligus menampilkan potensi yang ada di Desa/Kelurahan, guna meningkatkan sektor pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan. Kegiatan penyusunan profil desa dilaksanakan di 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut dengan target peserta Pokja Prodes masing-masing 2 (dua) orang. Tujuan bimtek profil desa adalah untuk mengupdate data profil desa pada aplikasi prodeskel.

- Persentase lembaga adat desa yang aktif.

Persentase lembaga adat desa yang aktif yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 ditargetkan mencapai angka 40%.

Era Globalisasi dan Otonomi Daerah mempengaruhi perkembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, sementara upaya pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dirasakan masih kurang, oleh karena itu dipandang perlu penguatan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Serta berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat maka Bidang Bina Pengembangan Kawasan melaksanakan kegiatan pembinaan Lembaga Adat Desa.

Jumlah Lembaga Adat Desa yang terbentuk di Kabupaten Tanah Laut

sebanyak 37 Lembaga Adat Desa. Maksud dan tujuan pembinaan Lembaga Adat Desa antara lain :

- Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan nasional dan daerah serta regulasi terkait identitas budaya dan hak-hak tradisional yang dimiliki oleh Lembaga Adat Desa;
- Meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan nasional dan kebijakan daerah serta ketentuan lain yang terkait dengan identitas dan hak-hak tradisional yang dimiliki oleh Lembaga Adat Desa;
- Meningkatkan fungsi dan peran Lembaga Adat Desa.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan Lembaga Adat Desa pada tahun 2023 berlokasi di 5 kecamatan. Karena terbatasnya pagu anggaran yang dimiliki serta yang diberikan kegiatan pembinaan Lembaga Adat Desa tidak bisa dilaksanakan di 37 Lembaga Adat Desa yang ada karena terbatasnya pagu anggaran.

Narasumber pada kegiatan tersebut berasal dari Tenaga Ahli Bidang Sosial Budaya Dasar Prov Kalsel.

Kegiatan diawali dengan Rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa dengan Peserta Sekretaris Desa di 52 Desa





PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Pemungutan dilaksanakan di 52 desa pada 11 Kecamatan



Penetapan Kepala Desa dengan Pelantikan Kepala Desa sebanyak 52 Kepala Desa pada 28 Desember 2023 di Balairung, SK Kepala Desa ditetapkan Tanggal 20 November 2023



**Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kec. Takisung
Selasa, 21 Maret 2023**



Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kec. Bajuin

Rabu, 29 Maret 2023



FGD Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kec. Kurau
Kamis, 26 Oktober 2023



c) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya pengembangan kawasan perdesaan	Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	141.854.554,-	122.188.000,-
2	Meningkatnya kualitas data desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	154.882.072,-	149.434.756,-
3	Meningkatnya kemampuan pengurus Lembaga Adat Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	61.586.961,-	57.978.100,-
4	Cakupan kinerja evaluasi tingkat perkembangan desa				Kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemdes & Kel	

- Program Peningkatan Kerjasama Desa Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Dengan indikator keluaran Jumlah Bimtek Kelembagaan BKAD dengan terget 1 kali terealisasi 1 kali (100%), Jumlah Bumdesma yang Dibentuk dengan terget 5 Bumdesma terealisasi 5 Bumdesma (100%) dan Jumlah Sosialisasi 2 kali dengan realisasi 2 kali (100%). Pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 141.854.554,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 122.188.000,- atau 86,14%.
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan indikator keluaran Jumlah Pokja Prodes yang dilatih dengan target 130 Pokja Prodes terealisasi 130 Pokja Prodes (100%). Pagu anggaran Rp. 154.882.072,- dengan realisasi anggaran Rp. 149.434.756,- atau 96,48%.
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt, Rw, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator keluaran Jumlah Pembinaan LAD dengan target 5 LAD terealisasi 5 LAD (100%). Pagu Anggaran Rp. 61.586.961,- dengan realisasi Rp. 57.978.100,- atau 94,14%.
- d) Analisis penggunaan sumber daya manusia.
 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai terget yang telah ditetapkan pada Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan terdiri dari :
 1. 1 (satu) orang Kabid;
 2. 3 (tiga) orang Sub Koordinator;
 3. 2 (dua) orang pelaksana; dan
 4. 2 (tiga) orang PTT
- e) Analisis kendala dan solusinya.
 Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan salah satu amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya adalah dalam rangka untuk

mempercepat pembangunan Desa, baik dari sisi fisik maupun sisi sosial

ekonomi. Yang menjadikannya dinilai sebagai upaya strategis adalah karena pembangunan kawasan perdesaan harus memiliki dimensi partisipatif yang melekat dalam seluruh proses pelaksanaannya, serta berperan untuk menyatukan seluruh program/kegiatan pembangunan dari pemerintah atasan dalam rangka membangun Desa.

Pembangunan desa harus terarah dan terpadu. Agar dapat terarah dan terpadu, pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan atau menurut ketentuan, aturan standar-strandar ataupun pedoman-pedoman tertentu. Ketentuan-ketentuan dan sebagainya itu disebut tata desa. Tata desa meliputi tata ruang fisik, tata masyarakat dan tata pemerintahan desa. Suatu undang-undang tentang pemerintahan desa pada hakekatnya adalah salah satu bentuk desa, yaitu Tata Pemerintahan Desa.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi antara lain :

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan kelembagaan desa.
2. Kurangnya pemahaman pentingnya transparansi pengelolaan keuangan BKAD bagi aparatur pemerintahan desa. Sehingga diperlukan peningkatan kapasitas bagi pengurus BKAD yang lebih spesifik.
3. Prosedur dan proses penyusunan pertanggungjawaban (Spj) masih dianggap sulit dan rumit oleh pengurus BKAD.
4. Kurangnya koordinasi antara lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dengan pemerintah daerah.
5. Pagu anggaran dari pemerintah daerah yang terbatas.

Solusi yang akan dilakukan adalah dengan terus menerus melakukan pembinaan berupa pelatihan, pendampingan dalam rangka penyusunan dokumen profil desa, kepengurusan BKAD dll kepada aparatur pemerintahan desa sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya sesuai dengan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat desa dan juga akan melakukan peningkatan kapasitas berupa kunjungan kedesa yang lebih maju. Walau dengan anggaran yang terbatas dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang Bina Pengembangan Kawasan memberikan solusi kepada aparatur pemerintahan desa agar bisa memanfaatkan dana yang ada pada Alokasi Dana Desa, agar dapat membantu kegiatan yang sifatnya tidak bisa diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

6. Sasaran Eselon IV Kasubag Umum dan Kepegawaian

Hasil Capaian Realisasi Sasaran Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2023			Capaian 2023 terhadap target akhir renstra
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Jumlah administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%
2	Melaksanakan pemenuhan dan pelayanan sarana dan prasarana kualitas SDM SKPD	Jumlah sarana prasarana dan dan SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	14 unit	100%	100%
3	Melaksanakan penyebaran informasi pembangunan daerah	Jumlah partisipasi kegiatan pameran pembangunan	2 kali	1 kali	1 kali	2 kali	2 kali	100%	100%
Rata-rata Capaian								100%	100%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata – rata Capaian Kinerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian telah terealisasi 100%. Dari 3 indikator kinerja, indikator jumlah administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan telah tercapai 100% dari target 2 dokumen. Indikator jumlah sarana prasarana dan dan SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan telah tercapai 100% dari target 14 unit. Dan indikator yang terakhir jumlah partisipasi kegiatan pameran pembangunan juga telah tercapai 100% dari target 2 kali.

b) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan target tahun 2022 dengan tahun 2023 yang terdiri dari indikator

jumlah administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan

tercapai 100% pada tahun 2023 dan juga tahun 2022 sebelumnya. Indikator jumlah sarana prasarana dan dan SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan tercapai 100% pada tahun 2023 dan juga tahun 2022 sebelumnya. Dan yang terakhir indikator jumlah partisipasi kegiatan pameran pembangunan juga tercapai 100% pada tahun 2023 dan hanya terlaksana 1 kali pada tahun 2022.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Indikator jumlah administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan.

Indikator jumlah administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2023 ditargetkan mencapai 100%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan jumlah administrasi perkantoran yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan adalah tersedianya 2 dokumen yaitu 1 dokumen Reformasi Birokrasi dan 1 dokumen kepegawaian.

- Indikator jumlah sarana prasarana dan dan SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan.

Indikator jumlah sarana prasarana dan dan SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2023 ditargetkan mencapai 100%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan jumlah sarana prasarana dan dan SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan adalah terpeliharanya 14 unit kendaraan yaitu 1 unit mobil jabatan dan 13 unit mobil/kendaraan operasional.

- Indikator jumlah partisipasi kegiatan pameran pembangunan.

Indikator jumlah partisipasi kegiatan pameran pembangunan dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2023 ditargetkan

mencapai 100%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan jumlah partisipasi kegiatan pameran pembangunan adalah terlaksananya 2 kali yaitu 1 kali

pameran hari jadi.

d) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Adapun beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja untuk mencapai target yang telah ditentukan adalah :

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	
1	Melaksanakan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran SKPD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.079.925	5.126.070
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.011.474	5.776.500
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.588.705	6.750.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	645.943.470	630.104.653
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.000.000	27.949.883
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	13.711.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	489.252.240	481.662.684

2	Jumlah sarana prasarana dan dan SDM SKPD yang terpenuhi dan terlayani sesuai ketentuan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,-	24.982.950
---	--	--	---	--	--------------	------------

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.976.000	72.641.850
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.845.285	4.243.500
3	Jumlah partisipasi kegiatan pameran pembangunan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.741.527	154.129.456

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator keluaran jumlah jenis dengan target kegiatan 1 Paket dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.079.925,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.126.070,- atau 84%.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator keluaran jumlah jenis dengan target kegiatan 1 Paket dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.011.474,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.776.500,- atau 82%.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator keluaran jumlah jenis dengan target kegiatan 2 Paket dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.588.705,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.750.000,- atau 89%.
4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator keluaran jumlah perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah dengan target kegiatan orang/kali dengan pagu anggaran sebesar Rp. 645.943.470,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 628.400.653,- atau 98%.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

dengan indikator keluaran jumlah jenis dengan target kegiatan 2 laporan

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 41.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.949.883,- atau 68%.

6. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator keluaran jumlah jenis dengan target kegiatan 3 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.711.000,- atau 91%.
7. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator keluaran jumlah jenis dengan target kegiatan 11 Laporan/ 20 orang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 489.252.240,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 481.662.684,- atau 98%.
8. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator keluaran jumlah unit/kendaraan jabatan dengan target kegiatan 1 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.982.950,- atau 100%.
9. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator keluaran jumlah unit/kendaraan operasional dengan target kegiatan 10 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 89.976.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 72.641.850,- atau 81%.
10. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator keluaran jumlah jenis dengan target kegiatan 8 jenis dengan pagu anggaran sebesar Rp. 164.741.527,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 154.129.456,- atau 94%.
11. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material dengan indikator keluaran jumlah paket dengan target 1 paket dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.825.000,- atau 98 %
12. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan indikator keluaran jumlah laporan dengan target 4 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.845.285,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.243.500,- atau 88%.

- e) Analisis penggunaan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri dari :

1. 1 (satu) orang kasubag;
2. 2 (dua) orang pelaksana; dan
3. 4 (empat) orang PTT

- f) Analisis kendala dan solusinya.

Sub Bagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai sesuai dengan era globalisasi
3. Terbatasnya pagu anggaran yang didapat mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas juga.

Solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah menambah sumber daya manusia dengan membuat surat ke BKPSDM Kab Tanah laut mengenai permintaan tenaga tambahan untuk menunjang kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

7. Sasaran Eselon IV Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Hasil Capaian Realisasi Sasaran Pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2023			Capaian 2023 terhadap target akhir renstra
			2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renja, Renja Perubahan dan Renstra)	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	100%

2	Melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD (Lakip dan LPPD/LKPj)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%
3	Pelaksanaan penyusunan SAKIP SKPD	Jumlah dokumen SAKIP SKPD (Pohon Kinerja, IKU dan PK)	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	100%
4	Melaksanakan penyusunan laporan keuangan SKPD (Bulanan, Triwulan, Semesteran dan laporan keuangan akhir tahun)	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan (Dokumen laporan keuangan bendahara pengeluaran, Laporan keuangan per triwulan, Laporan keuangan semesteran dan CALK	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	100%
		Rata-rata Capaian						100%	100%

a) Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata – rata Capaian Kinerja pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan telah terealisasi 100%. Dari 4 indikator kinerja, indikator jumlah dokumen perencanaan SKPD telah tercapai 100% dari target 3 dokumen, Indikator jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD telah tercapai 100% dari target 2 dokumen, indikator jumlah dokumen SAKIP SKPD telah tercapai 100% dari target 3 dokumen dan indikator yang terakhir jumlah dokumen laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan juga telah tercapai 100% dari target 4 dokumen.

b) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Perbandingan target tahun 2022 dengan tahun 2023 yang terdiri dari indikator jumlah dokumen perencanaan SKPD tercapai 100% pada tahun 2023 dan juga tahun 2022 sebelumnya. Indikator jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD tercapai 100% pada tahun 2023 dan juga tahun 2023 sebelumnya. Indikator jumlah dokumen SAKIP SKPD telah tercapai 100% pada tahun 2023 dan juga

pada tahun 2022, dan yang terakhir indikator jumlah dokumen laporan keuangan

SKPD sesuai ketentuan juga tercapai 100% pada tahun 2023 dan juga pada tahun 2022.

c) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Indikator jumlah dokumen perencanaan SKPD.

Indikator jumlah dokumen perencanaan SKPD yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2023 ditargetkan mencapai 100%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan jumlah dokumen perencanaan SKPD adalah tersusunnya 3 dokumen yaitu 1 dokumen renja, 1 dokumen renja perubahan dan 1 dokumen renstra.

- Indikator jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD.

Indikator jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2023 ditargetkan mencapai 100%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD adalah tersusunnya 2 dokumen yaitu 1 dokumen Lakip dan 1 dokumen LPPD/LKPj.

- Indikator jumlah dokumen SAKIP SKPD.

Indikator jumlah dokumen SAKIP SKPD dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 ditargetkan mencapai 100%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan jumlah dokumen SAKIP SKPD adalah tersusunnya 3 dokumen yaitu 1 dokumen pohon kinerja, 1 dokumen IKU dan 1 dokumen PK.

- Indikator jumlah dokumen laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan.

Indikator jumlah dokumen laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022

ditargetkan mencapai 100%. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan jumlah dokumen laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan adalah tersusunnya 4

dokumen yaitu 1 dokumen laporan keuangan bendahara pengeluaran, 1 dokumen laporan keuangan pertriwulan, 1 dokumen laporan keuangan semesteran dan 1 dokumen CALK.

d) Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja

Adapun beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Kinerja untuk mencapai target yang telah ditentukan adalah :

Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	
1	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan SKPD sesuai ketentuan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.343.903	13.501.200
2	Melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.472.888	8.716.100
3	Pelaksanaan penyusunan SAKIP SKPD					
4	Melaksanakan penyusunan laporan keuangan SKPD (Bulanan, Triwulan, Semesteran dan lapran keuangan akhir tahun)			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	10.244.705	9.115.500

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator keluaran jumlah dokumen dengan target kegiatan 7 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.343.903,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.501.200,- atau 94%.
2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator keluaran jumlah dokumen dengan target kegiatan 4 laporan dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 9.472.888,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.

8.716.100,- atau 92%.

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator keluaran jumlah dokumen dengan target kegiatan 5 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.244.705,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.115.500,- atau 89%.

e) Analisis penggunaan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

1. 1 (satu) orang kasubag;
2. 3 (tiga) orang pelaksana; dan
3. 2 (dua) orang PTT

f) Analisis kendala dan solusinya.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai seperti PC dan laptop.
3. Terbatasnya pagu anggaran yang didapat mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
4. Kurangnya akses internet.

Solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah menambah sumber daya manusia dengan membuat surat ke BKPSDM Kab Tanah laut mengenai permintaan tenaga tambahan untuk menunjang kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta permohonan kepada Dinas Kominfo untuk menambah jaringan akses internet.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023

Secara umum realisasi keuangan pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa(DPMD) dengan pagu Keseluruhan :

a. Pagu : Rp. 17.406.309.613,- terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 5.193.504.989
- Belanja Langsung Rp. 12.212.804.624

Untuk belanja langsung dengan 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan dengan realisasi capaian Keuangan Rp. 10.205.022.919,- prosentase sebesar 89%.

Ringkasan realisasi APBD terhadap 2023

Uraian	Tahun 2023	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	5.193.504.989,-	4.014.179.285
Belanja Gaji dan Tunjangan	5.193.504.989,-	4.014.179.285
Belanja Langsung	12.212.804.624	10.205.022.919
Belanja Barang dan Jasa	11.896.260.324	10.846.136.806
Belanja Modal	316.544.300	265.565.000,00
Total	17.406.309.613	15.475.141.654

2. Anggaran Realisasi menurut Sasaran dan Program

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OutPut Dalam DPA	Target Kinerja	Anggaran 2023 Rp	Realisasi			
					Fisik/Kinerja	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9=(8/5)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11	23.816.791,-	11	100	22.217.300,-	93
01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	14.343.903,-	7	100	13.501.200,-	94
02	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen	4 dokumen	4.541.688,-	4	100	8.716.100,-	92
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		31	5.013.204.564,-	31	100	4.233.832.015,-	
03	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	5.006.343.671,-	12	100	4.227.845.815,-	84
04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan	19 laporan	6.860.893,-	19	100	5.986.200,-	87
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			493.213.391,-			460.055.179,-	93
01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis	22 jenis	6.742.281,-	22 jenis	100	5.511.500,-	82
02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis	8 jenis	130.410.693,-	7 jenis	100	116.863.005,-	90

03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis	24 jenis	6.218.976,-	24 jenis	100	4.886.500,-	79
04	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis	8 jenis	7.313.439,-	8 jenis	100	6.168.800,-	84
		Jumlah Pengadaan	12490 lembar		11250 lembar	90		
05	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	400 orang/kali	342.526.00,-	381 orang/kali	95	326.625.374	95
		Jumlah perjalanan dinas diluar daerah	1 tahun		1 tahun	100		
		Jumlah rapat	24 kali		20 kali	83		
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		31	580.738.557,-	31	100	543.659.675,-	94
01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis	4 jenis	43.056.134,-	3 jenis	75	22.645.275,-	53
02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis	3 jenis	26.750.000,-	3 jenis	100	17.072.000,-	64
03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis	4 jenis	510.932.423	4 jenis	100	503.942.400,-	99
		Jumlah PTT	20 orang		20 orang	100		
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		14	152.482.150,-			142.566.700	93
01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit/Kendaraan Jabatan	1 unit	25.000.000,-	1 unit	100	24.977.300,-	100
02	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit/Kendaraan Operasional	13 unit	127.482.150,-	13 unit	100	117.589.400,-	92
II	PROGRAM PENATAAN DESA		11 desa	300.943.946,-	11	100	258.004.000,-	86

1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa		11 desa	300.943.946,-	11	100	258.004.000,-	86
01	Sub Kegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang di tetapkan dan ditegaskan batas desa	11 desa	300.943.946,-	11	100	258.004.000,-	86
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		8	141.854.554,-	8	100	122.188.000,-	86
1	Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa		8	141.854.554,-	8	100	122.188.000,-	86
01	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek Kelembagaan BKAD	1 kali	141.854.554,-	1 kali	100	122.188.000,-	86
		Jumlah BUMDesma yang dibentuk	5 Bumdesma		5 Bumdesma	100	-	
		Jumlah Sosialisasi	2 kali		2 Kali	100	-	
IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		1930	3.446.540.758,-	1,881	97	2.915.472.445,-	85
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		1930	3.446.540.758,-	1,881	97	2.915.472.445,-	85
01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bimtek /Sosialisasi Administrasi Pemdes	1 kali	67.587.350,-	1 kali	100	58.773.000,-	87
02	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi	130 desa	66.665.473,-	3 desa	2	25.201.800,-	38

03	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Terbinanya Aparatur Pemerintah Desa dan Aparatur Pemerintahan Kec	1377 orang	2.544.374.609,-	1377 orang	100	2.197.321.345,-	86
04	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Desa Berciri khas yang dibina	5 desa	159.992.317,-	7 desa	100	136.311.844,-	85
		Jumlah Orientasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Berprestasi	1 kali		1 kali	100		
		Jumlah Desa Tertinggal yang dibina	2 desa		2 desa	100		
05	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah badan usaha milik desa (BUMDesa) yang dibentuk	15 Bumdesa	393.072.414,-	15 Bumdesa	100	302.039.700,-	77
		Jumlah badan usaha milik desa (BUMDesa) yang dibina	115 Bumdesa		124 Bumdesa	100		
		Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas badan usaha milik desa (BUMDesa)	1 kali		1 kali	100		
06	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Pokja Prodes yang dilatih	130 pokja prodes	154.882.072,-	130 pokja prodes	100	149.434.756,-	96
07	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Terbinanya Aparatur Pemerintah Desa dan Aparatur Pemerintahan Kec	141 Aparatur	18.817.946,-	141 Aparatur	100	17.270.000,-	92
08	Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang dievaluasi	11 desa	41.148.577,-	11 desa	100	29.120.000,-	71
		Jumlah desa yang dievaluasi	1 desa		1 desa	100		

V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		80	1.596.082.342,-	80	100	1.522.116.405,-	95
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota		80	1.596.082.342,-	80	100	1.522.116.405,-	95
01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pembinaan LAD	5 LAD	61.586.961,-	5 LAD	100	57.978.100,-	94
02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Jumlah Dilaksanakannya Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang	29 desa	677.953.812,-	29 desa	100	654.764.000,-	97

03	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah kec yang melakukan pemetaan usaha ekonomi desa	2 kec	75.436.900,-	2 kec	100	66.501.400,-	88
		Jumlah Terealisasinya Pembuatan Program Database Pemetaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 prog database		1 prog database	100		
04	Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dilaksanakannya Kaji Tiru Posyantek	1kali	249.989.764,-	1 kali	100	236.440.600,-	95
		Jumlah Dilaksanakannya Lomba Kreasi dan Inovasi TTG Tk Kabupaten	1 kali keg		1 Kali Keg	100		
		Jumlah dilaksanakannya Pelatihan Penguatan Kelembagaan Posyantek Desa	2 angkatan		2 Angkatan	100		
		Jumlah dilaksanakannya Sosialisasi dan Pembentukan Posyantek	21 desa		12 desa	100		
05	Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dilaksanakannya Jambore Kader PKK	1 kali keg	531.114.905,-	1 kali keg	100	506.432.305,-	95
		Jumlah Dilaksanakannya Lomba	5 lomba		5 lomba	100		
		Jumlah Dilaksanakannya Pelantikan Ketua TP	1 kali keg		1 kali keg	100		

		PKK Kec						
		Jumlah pelaksanaan peringatan HKG PKK	1 kali keg		1 kali keg	100		
		Jumlah Dilaksanakannya Pertemuan PKK Desa	2 kali keg		2 kali keg	100		
		Jumlah Dilaksanakannya Pertemuan Rutin Bulanan TP PKK	5 kali keg		5 kali keg	100		
		Jumlah Dilaksanakannya Rakon PKK	1 kali keg		1 kali keg	100		
		Jumlah Dilaksanakannya Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja	1 kali sosialisasi		1 kali sosialisasi	100		
		Jumlah Dilaksanakannya Workshop LP3PKK	1 kali workshop		1 kali workshop	100		

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung				
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.598.386.729,-	1.965.911.553,-	5.193.504.989,-	4.014.179.285
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.407.956.942,-	2.261.934.262,-	5.193.504.989,-	4.014.179.285
Belanja Pegawai	5.006.343.671,-	4.227.845.815,-	12.212.804.624	10.205.022.919
Belanja Barang dan Jasa	6.550.039.596,-	5.817.325.104,-	11.896.260.324	10.846.136.806
Belanja Modal	177.222.562,-	159.952.000,-	316.544.300	265.565.000,00

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

perUpaya terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri sebagai pelaku proses yang memerlukan kerja keras dari berbagai pihak yang mengemban amanat tersebut. Untuk itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah laut perlu senantiasa berupaya untuk pencapaian tata kelola Pemerintahan yang baik. Disamping itu juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut senantiasa berkinerja produktif dalam memberikan pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berorientasi kepada Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan terbitnya undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut telah Berupaya melakukan pembenahan proses kerja internal dan eksternal. Harapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dapat menjadi pendorong Pemerintahan Desa untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat.

Di samping itu dari perspektif keuangan realisasi penyerapan harus ditingkatkan agar konsistensi dapat dilakukan secara baik. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut perlu menekankan komitmen untuk terus belajar dan senantiasa tumbuh dalam meningkatkan semangat kerja dan kesadaran kerja dalam memacu kinerja yang lebih baik dalam rangka keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dalam jangka panjang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi tentang berbagai capaian kinerja berbagai sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara transparansi dan akuntabilitas sehingga mampu dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good

Governance) di Kabupaten Tanah Laut.

Rata-rata capaian kinerja SKPD untuk Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 89%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik akan semakin meningkat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut berperan aktif melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan Lahirnya undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, segenap elemen Pemerintahan, Kelembagaan, dan Masyarakat desa dituntut untuk lebih aktif dalam membangun dan memajukan desa.

Filosofi dari pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya desa mandiri dengan dasar / fundamental pada keberdayaan Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa, Keberdayaan kehidupan sosial (Manusia dan Komunitas), Kelestarian nilai- nilai budaya, kemandirian perekonomian masyarakat desa (penanggulangan kemiskinan dan pengangguran) dan keberdayaan masyarakat di bidang Teknologi berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG).

Dengan memperhatikan perihal diatas, maka rencana tindak lanjut (sebagai langkah proaktif) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut yang dapat dilaksanakan ke depan adalah :

1. Secara Internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Tekhnis, in house training).
2. Secara Kelembagaan, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui penetapan skala prioritas pada program dan kegiatan dengan mengacu :
 - a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023
 - b. Isu-isu strategis yang berkembang dimasyarakat
 - c. Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

3. Secara Eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementrian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementrian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan SKPD terkait dalam lingkup Kabupaten Tanah Laut, serta Lembaga/Instansi lainnya, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tanah Laut.

Pada akhirnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut berupaya meningkatkan pembinaan (Komunikasi, Kerjasama dan Intensivikasi pendampingan) terhadap desa dalam rangka :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Meningkatkan Kinerja Kelembagaan masyarakat desa, melalui pengembangan peran serta LPM dalam proses perencanaan dan pembangunan, Pengembangan Lembaga Adat.
- c. Optimalisasi pembangunan desa menuju desa maju dan mandiri, melalui pengembangan ekonomi desa (BUMDesa, Posyantek, Teknologi Tepat Guna (TTG)
- d. Melaksanakan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Demikian, penyusunan LAKIP tahun 2023 ini kami buat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparaturnya pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Pelaihari, 20 Januari 2023

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut

H. BAMBANG KUSUDARISMAN, S.IP, M.SI
NIP. 19680816 199010 1 003